

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang ibukotanya adalah Bangkalan.

Sebelum ada jembatan Suramadu, pelabuhan Kamal merupakan salah satu penghubung atau pintu gerbang keluar masuk Madura dari Jawa dan sebaliknya.

Di sana juga terdapat sebuah pelayanan kapal Feri yang memuat penumpang pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Pada tahun 2009 lalu, diresmikan jembatan

Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan jembatan antar pulau terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu ini terletak di Kabupaten Bangkalan. Dengan

demikian, saat ini Madura memiliki dua pintu gerbang keluar masuk Madura dari Jawa ataupun sebaliknya. Selain itu, Bangkalan yang merupakan salah satu

kawasan perkembangan Surabaya serta tercakup dalam lingkup Gerbangkertosusila berharap dapat menstimulasi tujuan pembangunan

dapat terlaksana dengan baik dengan adanya jembatan Suramadu.

Kabupaten Bangkalan dengan luas wilayah 1.260,14 km² yang berada dibagian paling barat dari Pulau Madura terletak diantara koordinat 112^o 40'06" -

113^o 08'04" Bujur Timur serta 6^o 51'39" - 7^o 11'39" Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sampang
- Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Madura



Gambar. 2 Peta Wilayah Kabupaten Bangkalan
 Sumber: Data Peta ©2013, Tele Atlas

Secara administratif Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 Kecamatan yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Berikut daftar Kecamatan di Kabupaten Bangkalan disajikan dalam **tabel. 3** meliputi:

Tabel. 3
Kecamatan di Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Bangkalan	10	Tanjung Bumi
2	Kamal	11	Tanah Merah
3	Socah	12	Tragah
4	Arosbaya	13	Kwanyar
5	Kokop	14	Modung
6	Blega	15	Konang
7	Burneh	16	Labang
8	Galis	17	Geger
9	Sepulu	18	Klampis

Sumber: Olahan Penulis

Dilihat dari Topografi, maka daerah Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2 – 100 m di atas permukaan air laut. Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa wilayah yang terletak di pesisir pantai seperti kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh. Masing-masing wilayah tersebut memiliki ketinggian kurang lebih antara 2 – 10 m di atas permukaan air laut. Sedangkan wilayah yang terletak dibagian tengah mempunyai ketinggian antara 19 sampai dengan 100 m di atas permukaan air laut. Wilayah tertinggi di Kabupaten Bangkalan terdapat di Kecamatan Geger dengan ketinggian 100 m DPL.

Keadaan topografi tersebut mempengaruhi potensi alam yang ada di Bangkalan. Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Komoditi unggulan datang dari tanaman pangan berupa padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, kedelai, dan kacang hijau. Potensi produksi tanaman hortikultura juga cukup menonjol diantara adalah buah-buahan, sayuran dan tanaman obat-obatan. Kabupaten ini juga memiliki

potensi tanaman perkebunan dengan komoditi unggulan antara lain kelapa, jambu mete, kapuk randu dan pinang.

Buah-buahan yang dihasilkan dan sangat menonjol di hasilkan daerah ini adalah jambu biji, melinjo, pisang, salak, mangga dan jeruk. Untuk tanaman obat, potensi unggulan berupa jahe, kunyit dan laos. Potensi perkebunan di Kabupaten Bangkalan yang mendukung bagi ketersediaan bahan baku industri adalah kelapa, jambu mete, kapuk randu, pinang dan cabe jamu. Untuk potensi peternakan, yang menonjol adalah sapi potong, domba, ayam potong, ayam ras dan ayam buras.

Potensi perikanan juga sangat berpeluang dengan sebaran lokasi di 10 kecamatan. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain lele, nila dan tombro. Kabupaten Bangkalan juga menyimpan potensi kehutanan dengan produksi utama berupa kayu jati dan kayu akasia. Di sektor industri, jenis industri yang berpeluang untuk dikembangkan adalah industri berbasis agro seperti industri jamu tradisional. Selain itu masih ada industri kecil makanan, industri kerajinan tekstil serta industri kayu dan logam. Kabupaten Bangkalan juga memiliki objek pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan seperti wisata Pantai Siring Kemuning, Gunung Geger dan Pantai Rongkang. Serta objek wisata budaya seperti karapan sapi.

2. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

a. Kecamatan Labang

Kecamatan Labang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

Bangkalan. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kamal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kwanyar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tragah dan Burneh

Secara administratif kecamatan Labang terdiri dari 13 desa yakni sebagai berikut:

Tabel. 4
Desa di Kecamatan Labang

No	Desa	No	Desa
1	Sukolilo Barat	8	Morkepek
2	Ba'engas	9	Pang Pong
3	Bringen	10	Petapan
4	Bunajih	11	Sendang Dajah
5	Jukong	12	Sendang Laok
6	Kresiek	13	Sukolilo Timur
7	Labang		

Sumber: Olahan Penulis

1. Visi dan Misi Kecamatan Labang

Kecamatan Labang mempunyai visi yakni **“Terwujudnya tatanan masyarakat yang terampil dan prima di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Labang”**. Sedangkan misi kecamatan Labang yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan Labang di dalam meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa di lingkungan kecamatan Labang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh kecamatan Labang yakni terwujudnya pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mewujudkan Aparatur kecamatan dan desa yang berkualitas.

2. Rencana Program dan Prioritas Kegiatan

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tujuan: Tercapainya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabilitas dan transparan.

Sasaran: Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabilitas dan transparan.

2. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran: Terlaksananya pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran

3. Program Sarana Prasarana Aparatur

Tujuan: Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kinerja Aparatur

Sasaran: Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur

4. Program peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

Tujuan: Peningkatan pelayanan kinerja Aparatur

Sasaran: Terpenuhinya kegiatan operasional SKPD

b. Desa Sukolilo Barat

1. Sejarah Desa Sukolilo Barat

Sejarah desa Sukolilo Barat berkaitan dengan masuknya agama Islam ke Madura yang penyebarannya dilakukan oleh raja Demak saat itu yang bernama Raden Fatahillah. Beliau memerintahkan utusannya untuk menyebarkan agama Islam ke Madura melalui lintas perairan Gresik dan Socah Bangkalan. Kemudian utusan raja Demak menyisiri pantai selatan Madura menuju ke arah timur hingga tiba di daerah Sukolilo. Karena ikatan historis itu pula sehingga setiap desa pesisir yang disinggahi oleh utusan raja Demak mempunyai dialek bahasa yang sama.

Kata Sukolilo sendiri berasal dari kejadian ketika utusan raja Demak akan meninggal dunia, dia berkata "*saya suka dan rela (Suko lan lilo dalam bahasa Jawanya) kalau saya mati di sini*". Sejak saat itu para pengikut dan masyarakat di tempat itu menamai daerahnya dengan nama "Sukolilo". Saat ini secara administratif daerah itu terbagi dua yaitu Sukolilo Barat dan Sukolilo Timur.

Dimana, kedua desa tersebut masuk lingkungan kecamatan Labang kabupaten Bangkalan. Dari kata Suko Lan Lilo ini oleh orang-orang dulu diabadikan menjadi nama desa yaitu desa Sukolilo dan karena letaknya dibagian barat maka menjadi "Sukolilo Barat". Desa Sukolilo Barat terdiri dari 8 dusun, yaitu:

- 1) Dusun Kolak;
- 2) Dusun Bere' Lorong;
- 3) Dusun Tenggina;
- 4) Dusun Jarak Lanjang;
- 5) Dusun Kejawan;

6) Dusun Pandih;

7) Dusun Sekar Wungu;

8) Dusun Kesek Timur.

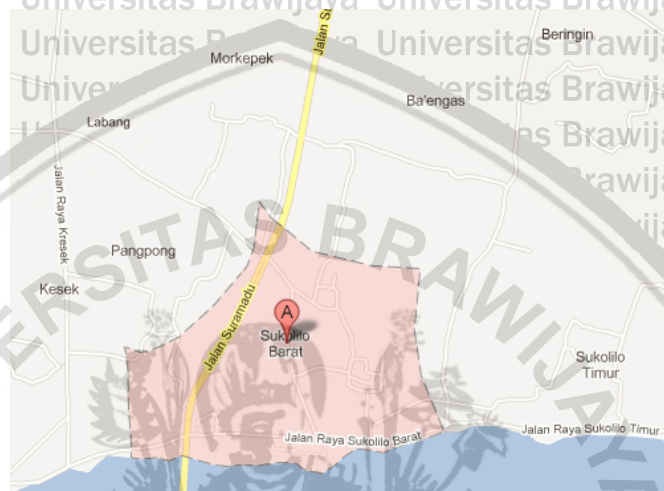
Adapun sejarah kepemimpinan pemerintahan desa Sukolilo Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 1960-1982 : R. Sumodiputro
- 2) Tahun 1982-1985 : Djaffar
- 3) Tahun 1985-2002 : Radjeman
- 4) Tahun 2003-2008 : H. Ayyub
- 5) Tahun 2008-Sekarang : H. Ayyub

2. Desa Sukolilo Barat secara Demografis dan Geografis

Desa Sukolilo Barat kecamatan Labang kabupaten Bangkalan provinsi Jatim Timur, merupakan salah satu dari 13 desa di kecamatan Labang yang mempunyai jarak 18 km dari kota Kabupaten. Sedangkan jarak tempuh desa Sukolilo Barat ke kantor kecamatan Labang yaitu ± 1 Km. Kecamatan Labang sendiri merupakan salah satu dari 18 kecamatan di kabupaten Bangkalan yang termasuk kategori kecamatan miskin. Di Desa ini terdapat 8 dusun, meliputi: dusun Kolak, dusun Bere' Lorong, dusun Tengginah, dusun Jarak Panjang, dusun Kejawan, dusun Pandih, dusun Sekaryang terdiri laki-laki sebanyak 3.096 orang; perempuan sebanyak 3.107 orang dan kepala rumah tangga sebanyak 1.406 orang. Wungu dan dusun Kesek Timur. Jumlah penduduknya sebanyak ± 6.203 orang.

Secara geografis desa Sukolilo Barat kondisinya termasuk daerah dataran tinggi (dengan ketinggian dari permukaan laut 3 meter). Luas wilayahnya 176,40 Ha atau 1,76 Km².



Gambar. 3 Peta Desa Sukolilo Barat

Sumber: Data Peta ©2012, Tele Atlas

Berdasarkan peta diatas dapat diketahui batas-batas Wilayah Desa Sukolilo

Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ba'engas;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kesek;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukolilo Timur.

3. Visi dan Misi Desa Sukolilo Barat

Visi adalah sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya Desa Sukolilo Barat mempunyai visi sebagai berikut:

“Terwujudnya kehidupan masyarakat desa Sukolilo Barat yang maju dan sejahtera menuju masyarakat madani yang ditopang dengan kemajuan ekonomi yang berdasarkan kepada kekuatan industri. Perdagangan dan jasa melalui pengelolaan sumberdaya alam yang ada di lingkungan sekitar berupa potensi bahari dan juga mengakses sumber daya dari luar dalam rangka industrialisasi jembatan Suramadu”.

Untuk mencapai keberhasilan Visi tersebut, Desa Sukolilo Barat mempunyai beberapa misi yakni sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pembangunan prasarana infrastruktur transportasi yang memadai sebagai akses perekonomian dalam rangka industrialisasi jembatan Suramadu.
2. Mempercepat tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi dan jasa dengan mewujudkan prasarana transportasi interkoneksi jembatan Suramadu.
3. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan kawasan berbasis produk unggulan yang spesifik dan kompetitif melalui potensi bahari yang ada.
4. Meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan masyarakat miskin dan kelompok perempuan agar mampu berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik (*Good Governance*).
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang potensial didukung oleh tingkat mutu dan kualitas pendidikan masyarakat yang tinggi dan pemanfaatan IPTEK dalam rangka penanggulangan pengangguran.

6. Peningkatan dan pemanfaatan kredit usaha dana bergulir dengan bunga rendah untuk pengembangan usaha mikro.
7. Meningkatkan keluarga sejahtera yang didukung dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
8. Meningkatkan dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
9. Menciptakan ketentraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat bagi kelangsungan pembangunan di desa Sukolilo Barat.

4. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial Budaya

Pembangunan aspek sosial budaya meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keluarga berencana, bidang keagamaan, bidang keamanan, bidang sosial serta kebudayaan daerah. Pada umumnya masyarakat Madura mempunyai tatanan rumah permukiman tradisional yang sampai saat ini dan sebagian besar masih terpelihara. Dalam satu kelompok rumah biasanya terdiri dari 2 sampai 10 rumah yang masih punya hubungan kekerabatan atau keluarga yang saling mengikat yakni mulai dari anak, ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, cicit, dst sehingga rumah-rumah tersebut tersusun mulai dari arah barat-timur. Hal ini menunjukkan hierarki dalam keluarga atau urutan berdasarkan tua-muda dalam keluarga tersebut. Biasanya permukiman mereka berdekatan dengan lahan garapan, mata air atau sungai. Pola permukiman ini biasa dikenal dengan istilah "Taneyan Lanjheng". Selain itu adat istiadat Seperti Cocogen, Pelet Kandung, To' Oto', Toron Tana sampai sekarang masih hidup di kalangan masyarakat. Adat

istiadat Madura juga bersifat keagamaan sehingga kegiatan yang dilakukan rata-rata berbasiskan pada nilai-nilai keagamaan.

Pendidikan di desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan masih lebih memperhatikan pendidikan yang berbasiskan keagamaan islam. Hal ini terlihat dari jumlah Sekolah Islam di desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang sangat dominan daripada pendidikan menurut jenis sekolah Negeri ataupun Swasta. Adapun pondok pesantren yang ada di desa Sukolilo Barat ada empat dimana di dalamnya juga mempunyai lembaga pendidikan sendiri.

Beberapa jenis sekolah Islam di desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan tersebut yakni meliputi Sekolah Diniyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Pondok Pesantren. Sekolah Diniyah adalah sekolah yang memberikan pelajaran khusus tentang keagamaan. Sedangkan Sekolah Ibtidaiyah adalah sekolah Islam setingkat dengan SD, Sekolah Tsanawiyah setingkat dengan SMP dan Aliyah setingkat dengan SMA. Sekolah Diniyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah pada dasarnya sama dengan sekolah umum namun sekolah ini memiliki kelebihan yakni memberikan tambahan mata pelajaran keagamaan Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel. 5** dan **tabel. 6** yakni sebagai berikut:

Tabel. 5
Jumlah Sekolah menurut jenis Sekolah

Tahun	Negeri				Swasta			
	TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA
2007		2		3			3	3
2008		2		3			3	3
2009		2		5			3	3
2010		2		5			3	3

Sumber: Kec. Labang dalam Angka 2011

Tabel. 6
Jumlah Sekolah Islam

Tahun	Diniyah	Ibtidaiyah	Tsanawiyah	Aliyah	Ponpes
2007	8	1	3	1	3
2008	8	1	3	1	3
2009	8	1	3	2	3
2010	8	1	3	2	3

Sumber: Kec. Labang dalam Angka 2011

Orang tua murid di wilayah ini lebih memprioritaskan anak-anaknya masuk ke sekolah Islam. Hal ini karena mereka ingin anak-anaknya menjadi anak yang berpegang teguh pada keagamaan Islam dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagian besar masyarakat di desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan beranggapan bahwa berinvestasi untuk kehidupan akhirat lebih penting karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat disini pandai mengaji dan paham tentang ilmu keagamaan. Hal ini yang juga mengakibatkan perkembangan sekolah umum kurang diperhatikan.

b. Kondisi Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan salah satu penggerak utama pembangunan sejalan dengan pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebagai upaya peningkatan SDM. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang. Beberapa jenis sektor ekonomi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yakni meliputi bidang pertanian, penggalian, industri, konstruksi, perdagangan, angkutan dan jasa. Hal ini Seperti yang disajikan pada **tabel. 7** yakni sebagai berikut:

Tabel. 7
Rumah Tangga menurut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Tahun			
	2007	2008	2009	2010
Pertanian	715	715	715	713
Penggalian	56	56	56	58
Industri	65	65	65	69
Listrik/Air				
Konstruksi	86	86	86	87
Perdagangan	94	96	96	101
Angkutan	115	114	114	118
Jasa	187	185	185	187

Sumber: Kec. Labang dalam Angka 2011

Berdasarkan tabel diatas peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan masih menggantungkan hidupnya pada alam. Hal ini berdasarkan jumlah rumah

tangga menurut sektor ekonomi dalam bidang pertanian yang lebih mendominasi sektor perekonomian lainnya.

c. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Pembangunan jembatan Tol Suramadu diharapkan akan mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi dan tata ruang wilayah-wilayah tertinggal yang ada di Pulau Madura. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut diatas, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), yang secara struktural terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Peraturan perundang-undangan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk lebih mendukung peningkatan kinerja BPWS didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana termaksud didalam peraturan perundangan tersebut diatas.

Badan Pelaksana BPWS (Bapel BPWS), sesuai dengan amanah Perpres 27 Tahun 2008 diatas, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu.

Kegiatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan Bapel BPWS dilaksanakan di 3 (tiga) kawasan, yaitu Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Surabaya (600 Ha), Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Madura (600 Ha) dan kawasan khusus di Utara Pulau Madura (600 Ha). Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJSS) dan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dikembangkan untuk mendorong perkembangan ekonomi, sedangkan

kawasan khusus di Utara Pulau Madura untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Peti Kemas.

Bapel BPWS juga bertugas untuk stimulasi pembangunan infrastruktur untuk wilayah Suramadu secara keseluruhan. Dalam hal ini Bapel BPWS melakukan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian/LPNK lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun swasta/masyarakat di wilayah Madura.

1. Visi dan Misi

VISI

Masyarakat Madura umumnya adalah agraris dan dengan budaya yang kuat berakar pada agama Islam. Secara geografis berpotensi menjadi kawasan pertanian, perikanan dan industri serta berpotensi mengembangkan pelabuhan di Pantai Utara Madura. Potensi pengembangan pelabuhan ini sesuai dengan kondisi kedalaman laut antara 14 – 20 meter serta lokasinya yang dekat dengan salah satu ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) Laut Jawa. Selain itu, kawasan ini juga mempunyai potensi strategis karena dekat dengan pusat pertumbuhan Surabaya dan sekitarnya yang merupakan terbesar kedua di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka visi wilayah Suramadu adalah:

“Terwujudnya Wilayah Suramadu Sebagai Pusat Pertumbuhan

Ekonomi Jawa Timur dan Sebagai Simpul Transportasi Nasional Yang

Tetap Dapat Mempertahankan Nilai Budaya Yang Hidup Dalam

Masyarakat.”

MISI

Untuk mewujudkan visi wilayah Suramadu di atas, maka misi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kawasan potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan perkembangan antar wilayah.
- b. Mengembangkan kegiatan sektor produktif pada masing – masing kawasan yang didukung oleh potensinya dan mempunyai pengaruh kuat terhadap pengembangan wilayah sekitarnya.
- c. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung sektor pada kawasan – kawasan dan untuk mendukung kelancaran arus barang antar kawasan.
- d. Mengembangkan kawasan industri dan jasa yang kompetitif pada skala dunia.
- e. Mengembangkan infrastruktur dan kawasan untuk meningkatkan kualitas tata ruang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kemampuan Sumberdaya Manusia dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat.
- g. Mengelola infrastruktur untuk menjamin kehandalannya.
- h. Mengembangkan sistem perizinan dan pelayanan publik yang cepat dan transparan.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Timur dan sebagai simpul transportasi internasional, maka pengembangan wilayah Surabaya-Madura tidak hanya memiliki lingkup Surabaya-Madura saja, namun juga wilayah pendukung

sekitarnya. Oleh karena itu, selain pengembangan internal kawasan, maka pengembangan wilayah Surabaya-Madura perlu disinkronkan dengan wilayah sekitarnya melalui upaya-upaya:

- a. Mengintegrasikan kawasan pertumbuhan di Pulau Jawa sinergi dengan pengembangan wilayah Surabaya-Madura.
- b. Mengintegrasikan pengembangan sistem perkotaan Pulau Madura dengan sistem perkotaan di Pulau Jawa.
- c. Mengintegrasikan sistem kegiatan ekonomi dan transportasi internal wilayah Surabaya-Madura dengan wilayah sekitarnya.
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

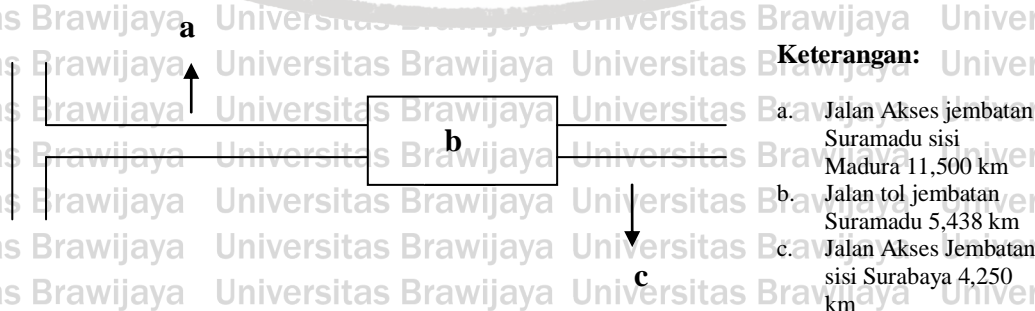
B. Gambaran Umum Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura

Pengelolaan jembatan Suramadu, pengembangan wilayah kaki jembatan dan pengelolaan tol jembatan Suramadu mempunyai kepengurusan tersendiri yang dinaungi oleh institusi/lembaga terkait yang telah disepakati. Jembatan Suramadu itu sendiri dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan jalan tol jembatan Suramadu dikelola oleh jasa marga. Sedangkan pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu baik itu di sisi Surabaya maupun di sisi Madura secara khusus menjadi tanggungjawab Badan Pelaksana yang merupakan institusi langsung dari presiden yakni Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Dalam mengembangkannya BPWS juga bekerja sama dengan pemerintah daerah yakni Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya dan empat Kabupaten di wilayah Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Surabaya. Gambaran

umum kawasan kaki jembatan suramadu di sisi Madura yang akan disajikan berikut mendeskripsikan tentang keadaan atau kondisi yang ada pada saat ini.

1. Jalan Akses Jembatan Suramadu

Daerah pembangunan jalan akses jembatan Suramadu telah merubah sebagian permukiman masyarakat di Kecamatan Labang, Desa Sukolilo Barat juga terkena proyek pembebasan lahan. Jalan akses jembatan Suramadu terbagi menjadi dua bagian yakni di sisi Surabaya dan di sisi Madura. Panjang jalan akses di sisi Surabaya ini sekitar 4,250 km. Sedangkan panjang jalan akses di sisi Madura ini sekitar 11,500 km. Jalan akses ini terbagi dalam empat jalur yakni dua jalur kiri dan kanan untuk kendaraan roda dua dan kendaraan lebih dari roda dua. Jalan akses ini merupakan hasil pembangunan yang benar-benar baru karena pada awalnya daerah yang menjadi jalan akses ini berupa daerah dataran tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belum ada akses jalan di daerah ini. Pembebasan lahan lahan yang dilakukan untuk jalan akses jembatan Suramadu di sisi Madura sebagian besar merupakan daerah permukiman dan sawah warga. Jarak penggantian yang dilakukan juga tidak jauh dari tempat sebelumnya.



Keterangan:

- a. Jalan Akses jembatan Suramadu sisi Madura 11,500 km
- b. Jalan tol jembatan Suramadu 5,438 km
- c. Jalan Akses Jembatan sisi Surabaya 4,250 km

Gambar. 4 Denah Jalan Akses jembatan Suramadu

Sumber: Olahan Penulis

Daerah pembangunan jalan akses jembatan Suramadu ini ada yang berupa dataran tinggi maupun dataran rendah. Untuk kesempurnaan pembangunan jalan dengan melihat keamanan dan kenyamanan dalam berkendara sehingga harus dilakukan proses *cut and fill*. *Cut* adalah memotong daerah bagian yang menonjol sedangkan *fill* mengisi daerah bagian lembah.

2. Locket Tol jembatan Suramadu

Interaksi tanpa batas secara global mulai dirasakan oleh masyarakat Madura khususnya di desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Semenjak jembatan Suramadu beroperasi sudah tidak ada sekat yang membatasi interaksi antara pulau Jawa dan pulau Madura. Jembatan yang menghubungkan antara pulau Jawa dan pulau Madura ini memiliki pintu untuk keluar-masuknya kendaraan di kedua ujung jembatan yang disebut sebagai pintu tol jembatan Suramadu. Pintu tol jembatan Suramadu ini dilengkapi dengan pos locket administrasi yang dibuat sebagai tempat pembayaran penyebrangan menuju Surabaya atau sebaliknya bagi pengendara baik itu roda dua sepeda motor maupun lebih dari roda dua seperti mobil, bus dan truk dsb.

Untuk menyebrang ke Pulau Jawa dengan menggunakan fasilitas transportasi tol jembatan Suramadu dikenakan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 395/KPTS/M/2009 per 10 Juni 2009 tentang penetapan jalan tol, pengoperasian, golongan jenis kendaraan bermotor, dan tarif tol pada jalan tol jembatan Suramadu. Golongan I terdiri dari sedan, jip, pickup/truk kecil, dan bus yang

dikenakan biaya Rp30.000,-, golongan II terdiri dari truk dengan dua gandar yang dikenakan biaya Rp45.000,-, serta golongan III terdiri dari truk dengan tiga gandar yang dikenakan biaya Rp60.000,-. Golongan IV terdiri dari truk dengan empat gandar yang dikenakan biaya Rp75.000,-, golongan V terdiri dari truk dengan empat gandar yang dikenakan biaya Rp90.000,-, dan golongan VI untuk kendaraan bermotor roda dua yang dikenakan biaya Rp3.000,-. Pihak Jasa Marga juga melengkapi fasilitas pengoperasian jembatan tol seperti menyediakan kendaraan derek, ambulans, patroli, *rescue*, serta dibantu oleh kendaraan patroli jalan raya (PJR).



Gambar. 5 Loker Tol Jembatan Suramadu

3. Keamanan

Jembatan Suramadu yang kini telah berhasil meniadakan sekat interaksi diantara pulau Madura dan pulau Jawa membuat kelancaran arus transportasi dari pulau Madura ke Pulau Jawa menjadi lebih efektif dan efisien baik itu dari segi waktu maupun biaya. Jembatan Suramadu memberikan kemudahan akses

transportasi bagi masyarakat Madura untuk menyebrang ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Dengan demikian, keamanan sangat diperlukan untuk mengantisipasi ataupun menanggulangi terjadinya kriminalitas ataupun bahaya lainnya di ranah lalu lintas kawasan jembatan Suramadu. Pos keamanan ini dijaga oleh beberapa anggota dari kepolisian yang bertugas secara bergantian. Lokasi pos keamanan ini berada di sebelah kanan sekitar 100 m dari lokasi loket pintu tol jembatan Suramadu. Selain itu, untuk lebih meningkatkan keamanan di wilayah Suramadu dipasang CCTV di beberapa sudut dan dilakukan patrol dalam beberapa kali selama 24 jam.

4. Posko Informasi Pariwisata

Pada saat ini, jembatan Suramadu adalah jembatan antar pulau pertama dan terpanjang yang dibangun di Indonesia. Jembatan Suramadu juga mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Indonesia yakni terbukti dengan ramainya kendaraan baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat berplat N, B, L, W, AG, DK, dsb yang berlalu lalang melintas untuk sekedar melihat jembatan Suramadu. Masyarakat dari luar pulau Madura ini tentu tidak hanya ingin tahu atau sekedar melihat jembatan Suramadu saja namun juga ingin berkesempatan untuk mengenali wisata di Madura. Oleh karena itu, Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Bangkalan memanfaatkan kesempatan ini dengan membangun Posko Informasi Pariwisata. Pusat Informasi Pariwisata menyediakan seputar informasi tentang pariwisata yang ada di Madura.

Hal ini bertujuan untuk membantu wisatawan daerah luar pulau Madura yang

ingin melakukan perjalanan wisata serta meningkatkan kunjungan wisata di Pulau Madura.



Gambar. 6 Posko Informasi Pariwisata

5. Usaha masyarakat

Pengguna jasa penyebrangan Suramadu khususnya dari luar pulau Madura tentu ingin membawa sesuatu sebagai kenangan atau buah tangan bahwa mereka pernah singgah di Madura. Keadaan seperti ini yang mendorong masyarakat mengembangkan usaha dalam bidang perdagangan berskala kecil yakni dengan berjualan asesoris dan pernak pernik khas Madura seperti kerajinan tangan dari kerang, layang-layang dari kain, miniatur Suramadu, tas, dsb. Tidak jarang masyarakat pengguna jasa tol jembatan penyebrangan Suramadu mungkin akan merasa lapar sehingga membutuhkan energi untuk memulihkan ataupun meningkatkan daya tahan tubuhnya selama dalam perjalanan. Oleh karena itu ada juga masyarakat setempat yang memanfaatkan kesempatan ini dengan berjualan makanan dan minuman mulai dari es degan, es dawet, rujak, soto, bakso, dsb.

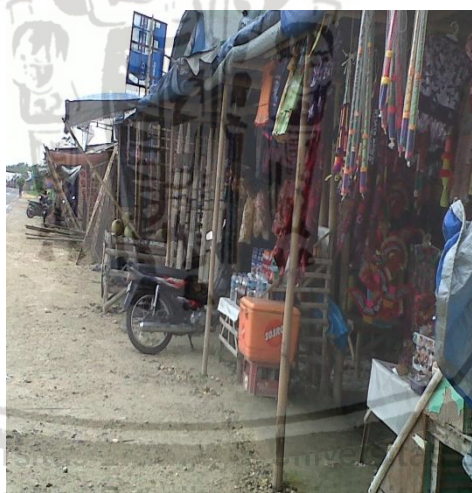
Perjalanan yang mungkin cukup jauh akan membuat pengguna jasa penyebrangan

Suramadu menyempatkan waktu atau bahkan tidak ingin melalaikan ibadah

mereka. Dalam memanfaatkan keadaan ini beberapa rumah dan lahan yang masyarakat setempat miliki disulap menjadi musholla dan toilet yang bersifat komersialisasi.

Lahan di kawasan kaki jembatan suramadu tersebut sebenarnya tidak disediakan untuk PKL. Hal tersebut menjadi inisiatif masyarakat dalam membuat lapangan kerja baru mengingat banyaknya pengunjung jembatan Suramadu.

Jumlah PKL yang terdaftar saat ini di kawasan kaki jembatan Suramadu sebanyak 220 PKL. Lahan yang mereka tempati untuk berdagang tidak gratis karena lahan tersebut masih milik masyarakat. Untuk masyarakat yang berdagang di lahan tersebut harus membayar sewa kepada pemilik lahan. Dan setiap harinya mereka dikenakan retribusi sebesar Rp1.000,-.



Gambar. 7 Kios PKL

Selain itu masyarakat juga memanfaatkan pantai di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura sebagai wisata laut sederhana. Beberapa masyarakat yang awalnya menjadi nelayan mereka mempunyai inisiatif dengan menawarkan jasa

wisata menikmati jembatan Suramadu dari laut. Perahu yang dipakai untuk mengangkut penumpang tersebut disebut *skoci*.



Gambar. 8 Skoci Nelayan Untuk Berwisata

C. Penyajian Data Fokus

1. Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Kehidupan Sosial

Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang

Kabupaten Bangkalan

a. Dampak dalam Bidang Sosial

1. Mobilitas Sosial

Pulau Madura dan Pulau Jawa sudah tidak lagi mempunyai sekat yang menghalangi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Sarana

transportasi jembatan Suramadu membuka peluang dan kesempatan bagi masyarakat Madura khususnya di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang

Kabupaten Bangkalan untuk memulai lembaran baru ataupun mengembangkan potensi yang ada di berbagai bidang. Daerah plosok kini telah menjadi daerah

menjadi daerah hidup sehingga dampak yang ditimbulkan dari segi mobilitas sosial yakni kecepatan transformasi baik itu dalam bidang budaya, perputaran ekonomi, kesehatan, pendidikan, informasi dsb yang mulai tersentuh secara global. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa:

“Sebelum ada jembatan Suramadu mobilitas masyarakat di desa ini menyangkut transformasi dalam bidang budaya, perputaran ekonomi, kesehatan, informasi dsb masih sangat lambat sekali mbak karena daerah ini masih merupakan daerah plosok yang aksesnya sangat terbatas. Tapi setelah adanya jembatan Suramadu mobilitas sosial jadi lebih tinggi”. (wawancara, hari Senin tanggal 17 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Balai Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang)

Sebelum ada jembatan Suramadu Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan merupakan daerah plosok yang memiliki mobilitas sosial yang rendah. Rendahnya mobilitas sosial juga berdampak pada pergeseran struktur dan peran serta status sosial bergerak secara lambat. Dan saat ini jembatan Suramadu merupakan sebuah anugerah bagi masyarakat di Desa Sukolilo Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan karena sebagai gerbang utama keluar masuknya pulau Madura menjadikan daerah ini memiliki laju mobilitas sosial yang tinggi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh warga Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Menyatakan Bahwa:

“Angka harapan hidup pastinya juga bertambah karena akses kesehatan, pendidikan, dan perekonomian seperti kemudahan mencari kerja di Surabaya rata-rata menduduki jabatan setingkat buruh pabrik dan satpam. Hal ini karena dilihat dari latar belakang pendidikan rata-rata masyarakat sini hanya lulusan SMP”. (wawancara, hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 pukul 09.15 WIB, di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang)

Dampak dari mobilitas sosial itu juga dibuktikan dengan masuknya pedagang sayur dari Surabaya ke Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten

Bangkalan. Orang Surabaya turut memanfaatkan akses ini untuk berjualan di Pulau Madura. Harga sayur yang dijual oleh pedagang dari Surabaya dengan menggunakan motor itu menurut masyarakat justru lebih murah. Ada juga beberapa pedagang di pelabuhan Kamal yang pindah berdagang di kawasan kaki jembatan Suramadu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh seorang pedagang di kawasan kaki jembatan Suramadu yang menyatakan bahwa:

“Iya mbak, ada juga pedagang dari pelabuhan Kamal yang pindah berjualan disini berasal dari Blega, Sampang dan daerah timur dengan alasan lokasi terjangkau dari rumah mereka. Kalo sopir angkot juga ada yang beralih profesi menjadi pedagang disini mbak, itu kios disebelah”. (wawancara, hari Selasa tanggal 25 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang)

Selain itu, mobilitas sosial yang tinggi ini berdampak pada maraknya tempat lokalisasi, peredaran narkoba dan pencurian sepeda motor. Kesempatan yang seharusnya dimanfaatkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang baik namun dipersalahgunakan. Kemudahan akses transportasi telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas berpikir yang rendah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala Seksi bidang Pemerintahan di kantor Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa:

“Tapi mbk, karena cepatnya mobilitas itu sekarang lokalisasi dan peredaran narkoba juga lebih cepat. Selain itu maling sepeda motor juga tambah banyak. Kalo pengrebekekan lokalisasi itu tidak bisa terjadi karena oknum sudah disogok”. (wawancara, hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Kantor Kecamatan Labang)

2. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduknya dalam suatu wilayah tertentu.

Semakin besar jumlah penduduk yang memiliki pendidikan yang tinggi berarti makin baik kualitas penduduknya. Berikut ini latar Belakang tingkat pendidikan

Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

Tabel. 8 Latar Belakang Tingkat Pendidikan Desa Sukolilo Barat

No.	Uraian	Jumlah
1	Penduduk usia < 10 yang buta huruf	-
2	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	1.360 Orang
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	1.375 Orang
4	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	1.786 Orang
5	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	1.586 Orang
6	Penduduk tamat D2	-
7	Penduduk tamat S1	163 Orang

Sumber: Desa, 2008-2012

Berdasarkan tabel. dapat terlihat bahwa latar belakang tingkat pendidikan di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan masih dirasa kurang. Akan tetapi, masyarakat cukup memperhatikan pengetahuan yakni dibuktikan dengan sudah tidak ada angka buta huruf. Walaupun sumber daya manusia dengan latar Belakang tingkat pendidikan SLTP/Sederajat paling mendominasi. Masyarakat yang berlatar pendidikan S-1 dapat menjadi motivasi bagi yang lainnya untuk lebih memperhatikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Sebelum ada jembatan Suramadu upaya untuk meningkatkan pendidikan selalu ada hal ini karena pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

suatu Negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Kualitas pendidikan yang baik disertai dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan tentu akan dapat mencetak SDM yang berkualitas pula. Pendidikan menjadi sangat sensitif karena menyangkut keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Selain itu, Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang memiliki banyak sekolah Islam hal ini juga dapat dikembangkan dan bermanfaat dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang khas berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Jembatan Suramadu sebagai jembatan penghubung antar pulau membuat gerak perpindahan masyarakat ke kota Surabaya semakin mudah untuk memperoleh berbagai akses termasuk akses kelengkapan dalam bidang pendidikan. Jembatan Suramadu telah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun namun belum membuat perubahan yang signifikan terhadap dunia pendidikan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala bidang Trantib di kantor Kecamatan

Labang Kabupaten Bangkalan yang menyatakan bahwa:

“...Sejak ada Suramadu pendidikan di Desa ini tidak banyak perubahan mbk. Ya, belum ada perubahan yang signifikan...”. (wawancara, hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 09.00 WIB, di Kantor Kecamatan Labang)

Dibangunnya jembatan Suramadu bagi warga Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah tantangan dan tanggungan bagi masyarakat ataupun pemerintah untuk bisa memperbaiki serta meningkatkan kualitas SDM-nya. Jembatan Suramadu sebagai jalan tembus langsung menuju daerah kota tepatnya di kota Surabaya ini juga membuat jalan masuknya warga kota daerah lain. Kawasan kaki jembatan Suramadu di sisi Madura yang berada di

wilayah ini mempunyai potensi-potensi yang dapat digali khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi. Keadaan semacam ini tentu akan membuat persaingan yang semakin ketat dalam segala bidang khususnya dalam bidang perekonomian ketika banyak investor asing ataupun luar daerah masuk untuk membuat pembangunan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang menyatakan bahwa:

“...Tetap selalu ada upaya tersendiri untuk meningkatkan pendidikan di desa ini walaupun Suramadu tidak ada mbak. Tapi Suramadu telah membuat kami untuk lebih keras lagi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di desa ini. Pastinya persaingan pun semakin keras, kita pun harus menjadi tuan rumah sendiri”. (wawancara, hari Senin tanggal 17 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Balai Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang)

Orang kota yang mempunyai pandangan yang sangat realistis tidak menutup kemungkinan akan melihat potensi yang ada di kawasan jembatan Suramadu khususnya di sisi Madura. Kondisi seperti ini tentu merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan karena cara berpikir masyarakat daerah ini belum sepadan dengan masyarakat kota. Walaupun belum ada perubahan yang signifikan. Terdapat upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dibuktikan dengan munculnya dua sekolah negeri baru yakni SMKN dan SMPN 02 di Desa Sukolilo Barat setelah ada Jembatan Suramadu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang menyatakan bahwa:

“Semenjak ada jembatan Suramadu muncul dua sekolah baru yakni SMK Negeri dan SMP Negeri 2. Terus apalagi ya mbak? kalo saya lihat perkembangan pendidikan di disini belum ada perubahan yang signifikan”. (wawancara, hari Senin tanggal 17 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Balai Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang)

Selain itu, ada juga beberapa masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang yang mendapatkan *training*, workshop dan sosialisasi dalam rangka mengembangkan potensi SDM yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas sehingga mereka menjadi tidak termajinalkan akibat interaksi secara global.

3. Budaya

Masyarakat Madura secara umum memiliki adat istiadat yang bersifat agamis. Hal ini terbukti dengan banyaknya bangunan masjid, musholla dan pondok pesantren. Begitu juga di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang merupakan bagian dari wilayah Madura memiliki adab pergaulan yang santun didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Salah satu budaya keseharian masyarakat yakni anak-anak mereka diharuskan pergi sholat ke Musholla ketika adzan maghrib dan mengaji setelah selesai sholat maghrib. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak sejak usia dini.

Dampak jembatan Suramadu mulai dirasakan oleh masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Jembatan Suramadu menjadi penghubung langsung menuju kota Surabaya sehingga menyebabkan adanya pergeseran peradaban yakni yang awalnya berstatus sebagai daerah plosok menjadi daerah hidup. Hal ini karena masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat kota.

Jalinan interaksi antara masyarakat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan masyarakat kota Surabaya karena mobilisasi yang tinggi yang menjadi penyebab bergesernya keberadaan pagu peradaban tersebut. Gaya hidup

masyarakat Madura pada umumnya adalah masyarakat yang sederhana dan apa adanya. Peradaban masyarakat desa dan masyarakat kota tentu terlihat sangat kontras. Peradaban yang terlihat adalah mengenai adab pergaulan masyarakat desa ini sudah mulai kekota-kotaan seperti imitasi masyarakat desa terhadap tingkah laku dan gaya hidup masyarakat kota seperti dalam berbahasa, berbusana, berpacaran, dsb. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa:

“Peradaban pergaulan desa ini sudah mulai kekota-kotaan. Adat istiadat juga semakin luntur. Ya itu karena masalah timbal balik mungkin ya mbk. Suramadu sebagai sarana penghubung yang menjadikan sudah tidak ada sekat lagi antara pulau Jawa dan Madura. Contohnya: Masalah pacaran. Sebelum ada jembatan Suramadu, kalo pacaran ya di dekat-dekat sini saja. Tapi sejak ada Suramadu mereka yang pacaran sudah berani dan bebas keluar daerah”. (wawancara, hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Kantor Kecamatan Labang).

Hal yang sama diungkapkan oleh Aktivistis mahasiswi IKIP Bangkalan yang menyatakan bahwa:

“Sejak ada jembatan Suramadu saya melihat adanya suatu perubahan yang cukup signifikan dalam hal perubahan gaya hidup khususnya remaja. Ya mulai dari cara mereka berpakaian dan tingkah laku yang meniru orang kota”. (wawancara, hari Jum’at 18 Januari 2013 pukul 20.36 WIB di kediamannya)

Salah seorang remaja di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa sekarang dia sering jalan-jalan ke Surabaya sejak ada jembatan Suramadu :

“Sejak ada jembatan Suramadu. Saya jadi lebih sering jalan-jalan ke Surabaya mbk. Kalo beli baju juga seringnya ke ITC di sana banyak pilihan, murah dan bagus-bagus bajunya. Dan juga biar gaul ngikut trend gitu... he he he”. (wawancara, hari Kamis 31 Januari 2013 pukul 10.00 Wib, di Kawasan jembatan Suramadu)

Keberadaan jembatan Suramadu juga yang membuat mobilitas semakin tinggi sehingga membangun interaksi sosial yang tinggi. Interaksi sosial tersebut membuat sebuah perubahan dalam salah satu budaya di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yakni kirab perahu hias yang dilakukan antara nelayan di Kecamatan Labang dengan nelayan yang berasal dari Surabaya.

Hal ini dilakukan sebagai ajang tali siltaurrahmi antar warga nelayan Madura – Surabaya dimana lomba dan pawai hias perahu melalui rute dari kaki jembatan Suramadu sisi Madura hingga di bentang tengah. Sehari sebelum lomba di laksanakan, para nelayan di sebukkan dengan menghias perahu mereka dengan sedemikian rupa agar perahu tersebut bisa menang dalam lomba, seperti dengan memasang beberapa aksesoris serta mengecat perahunya dengan tidak merubah bentuk perahu buatan khas mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu nelayan yang mengikuti lomba tersebut menyatakan bahwa:

“Pawai dan hias perahu ini sudah rutin di gelar setiap tahun menjelang lebaran ketupat oleh masyarakat nelayan di sini, salah satunya sebagai ajang silturrahmi antara para nelayan, namun bedanya tahun ini para nelayan Surabaya juga ikut bergabung ke sini. Hal ini dilakukan agar tidak selalu ternjadi konflik seteleh menangkap ikan yang sering terjadi dengan para nelayan Surabaya.” (wawancara, hari Senin tanggal 21 Februari 2013 pukul 09.00 WIB, di pinggir pantai dekat Suramadu.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bergesernya pagu peradaban karena pengaruh akibat terjalannya interaksi yang tinggi dengan masyarakat luar. Kebebasan dalam bertindak pun menjadi sebuah hal yang nyata karena pada awalnya merupakan daerah yang terisolir. Jembatan Suramadu juga telah membuat masyarakat menyatu secara global yakni dengan adanya pawai dan lomba hias perahu.

b. Dampak dalam bidang Ekonomi

1. Kelancaran Arus Transportasi

Sarana transportasi merupakan salah satu pendukung pembangunan terpenting dalam kegiatan masyarakat terutama menyangkut distribusi barang dan jasa. Kelancaran transportasi tentu sudah menjadi kebutuhan masyarakat karena juga menyangkut tentang kelancaran dalam kegiatan masyarakat diberbagai bidang. Madura khususnya Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan termasuk daerah yang tertinggal dan kegiatan masyarakat Pulau Madura masih belum maksimal serta mengglobal karena keterbatasan akses transportasi. Sebelum ada Jembatan Suramadu, kegiatan masyarakat tidak dapat bergerak bebas sampai ke Pulau Jawa karena tersekat oleh laut selat Madura. Hal ini tentu menjadi penghalang bagi masyarakat dalam melakukan kegiatannya terutama untuk menyokong pembangunan.

Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang dekat dengan pesisir pantai. Sebelum adanya jembatan Suramadu masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dapat menggunakan dua pilihan alat transportasi laut untuk mengadakan perjalanan lintas pulau yakni dengan menggunakan perahu atau menggunakan kapal Feri di Pelabuhan Kamal. Tidak semua masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan memiliki alat transportasi ini. Perahu layar bermesin sebagai alternatif alat transportasi sederhana ini biasanya milik pribadi dan dipakai secara pribadi. Mereka memilih alternatif ini karena biayanya relatif terjangkau.

Masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya juga membuat jalan tembus sendiri menuju ke Kamal yakni melewati daerah Jukong. Daerah Jukong merupakan daerah plosok yang jalannya tidak beraspal dan tidak rata sehingga membuat pengguna jalan tidak merasa nyaman. Selain itu ada juga beberapa masyarakat yang memilih harus putar balik untuk melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Bagi mereka yang tidak mempunyai kendaraan pribadi mereka harus oper kendaraan umum tiga kali. Mereka harus menaiki ojek sampai ke jalan umum untuk menemukan kol jurusan Kamal. Setelah tiba di pelabuhan Ujung Kamal, masyarakat harus menaiki kapal feri. Akan tetapi untuk sampai ke pelabuhan Ujung Kamal bahkan sampai menaiki kapal pun masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemacetan yang terjadi membuat hambatan dalam perjalanan ke tempat yang dituju. Khususnya jika pada hari libur karena mereka harus antri kurang lebih sepanjang 2 km. Waktu pelayaran untuk sampai ke pelabuhan Perak di Surabaya memang hanya 30 menit namun waktu yang dibutuhkan dapat mencapai kurang lebih dua jam karena panjangnya antrean.

Antrean panjang akan membuat mereka sampai ke Pulau Jawa menjadi tidak tepat waktu dan biaya yang dikeluarkan juga tidak efektif dan efisien. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi yakni untuk naik ojek sebesar Rp3.000 – Rp5.000,- sedangkan untuk biaya kol sampai ke pelabuhan Ujung Kamal sebesar Rp5.000,- – Rp6.000,- dan untuk biaya masuk peron sampai serta kapal Feri itu sendiri sekitar Rp4.500,-. Kebutuhan rasa nyaman juga tidak terpenuhi sehingga berakibat pada daya tahan tubuh

masyarakat cenderung menurun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi bidang Trantib di kantor Kecamatan Labang menyatakan bahwa:

“...Sebelum ada jembatan Suramadu masyarakat di desa ini biasanya menggunakan perahu atau kalo nggak ya harus putar balik ke pelabuhan Kamal dulu mbk kalo ingin nyebrang ke Surabaya sana. Waktu jarak tempuh transportasinya juga sangat lama. Atau kalo nggak bagi yang punya motor sendiri ya lewat daerah Jukung sana itu”. (wawancara, hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 09.00 WIB, di Kantor Kecamatan Labang)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang yang menyatakan bahwa:

“... Untuk menyebrang ke Pulau Jawa masyarakat memiliki dua alternatif alat transportasi kalo nggak naik perahu ya naik kapal Feri. Waktu dan biaya juga sangat tidak efisien dan efektif. Selain itu masyarakat termasuk saya sendiri sangat tidak nyaman dengan itu. Apalagi kalo macet membuat pemborosan bensin serta tenaga menyangkut vitalitas tubuh.” (wawancara, hari Senin tanggal 17 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Balai Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang)

Sejak ada Jembatan Suramadu masyarakat sangat bersyukur atas dibangunnya akses transportasi penyebrangan antar pulau ini. Dampak yang dirasakan sangat terasa sekali karena transportasi lebih lancar dan cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Aktivist mahasiswi IKIP Bangkalan:

“... Saya jarang menggunakan kapal Feri kan sekarang sudah ada jembatan Suramadu. Transportasi menjadi lebih lancar dan cepat dan biaya transportasi juga murah...”. (wawancara, hari Jum'at 18 Januari 2013 pukul 20.36 WIB di kediamannya)

Dampak lain yang dirasakan yakni masyarakat juga tidak lagi harus putar balik ke pelabuhan Ujung Kamal atau menggunakan alternatif alat transportasi perahunya. Waktu dan biaya perjalanan yang lebih efektif dan efisien sehingga kebutuhan kenyamanan dalam perjalanan otomatis juga terpenuhi karena

kelancaran transportasi itu sendiri. Hal ini seperti diungkapkan oleh warga Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang yang menyatakan bahwa:

“... Tapi sejak ada jembatan Suramadu masyarakat sangat bersyukur sekali karena transportasi untuk nyebrang ke Surabaya sana lebih cepat. Selain itu saya juga lebih merasa nyaman saat dalam perjalanan karena tidak perlu mengantri panjang ke pelabuhan Ujung Kamal”. (wawancara, hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 pukul 09.15 WIB, di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang)

Kelancaran akses transportasi membuat masyarakat untuk memilih menggunakan kendaraan pribadi khususnya kendaraan bermotor roda dua.

Melihat kondisi kelancaran dan kemudahan akses transportasi yang seperti itu masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang mulai banyak mengkredit motor. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala Seksi bidang Pemerintahan di Kecamatan Labang menyatakan Bahwa:

“... Kelancaran dan kemudahan dalam akses transportasi membuat masyarakat di Desa Sukolilo Barat banyak yang mulai mengkredit motor”. (wawancara, hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 09.00 WIB, di Kantor Kecamatan Labang)

2. Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Sektor ekonomi dalam bidang Pertanian merupakan mata pencaharian yang paling dominan di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

Akan tetapi sektor ekonomi bidang pertanian di wilayah ini sudah mulai berkurang dan tidak aktif lagi sejak tahun 1983 dikarenakan adanya pembebasan lahan oleh investor sebuah pabrik rokok. Dengan demikian masyarakat mencari alternatif solusi pekerjaan lain dengan merantau ke daerah lain seperti Surabaya.

Dengan berbekal pendidikan yang seadanya dan *skill* yang kurang mereka nekat

pergi merantau ke kota lain di luar Pulau Madura. Persaingan yang ketat dengan masyarakat kota lain membuat masyarakat kesulitan memperoleh pekerjaan. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang beruntung mendapat pekerjaan sebagai seorang satpam, buruh pabrik, berdagang, dsb. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang menyatakan bahwa:

“Pertanian di desa ini sudah mulai berkurang sejak tahun 1983 karena pembebasan lahan oleh investor dari salah satu PT. pabrik rokok mbak. Masyarakat banyak yang pergi ke Surabaya untuk mencari kerja. Biasanya Cuma dapet kerja jadi buruh pabrik, satpam, dsb”. (wawancara, hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Balai Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang)

Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang dekat dengan pesisir pantai. Selain profesi dominan masyarakat di daerah ini adalah bertani namun masyarakat juga banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan pengamatan peneliti menemukan bahwa nelayan di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang masih berstatus sebagai nelayan tradisional. Dikategorikan sebagai nelayan tradisional karena nelayan di wilayah ini memanfaatkan sumber daya perikanan yang masih bersifat sederhana. Nelayan menggunakan peralatan tangkap tradisional, modal usaha kecil dan manajemen pengelolaan hasil tangkap juga relatif rendah. Mereka hanya menangkap ikan di sekitar pantai dan tidak sampai ke laut lepas. Dengan modal usaha yang kecil mereka membuat peralatan tangkap yakni berupa jaring tangkap yang dibuat sendiri dan perahu layar ataupun perahu layar yang telah dimodifikasi sendiri sehingga menjadi perahu bermesin. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh

salah satu nelayan Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang menyatakan bahwa:

“Biasanya saya memakai perahu untuk menangkap ikan. Peralatan yang digunakan ya jaring yang saya buat sendiri. Untuk menangkap ikan saya menggunakan perahu mesin. Dan saya juga sering menggunakan perahu perahu layar kalo anginnya mendukung dan untuk menghemat bahan bakar untuk mesin perahu”. (wawancara, hari Senin tanggal 21 Januari 2013 pukul 10.00 WIB, di kediamannya)

Dampak pembangunan jembatan Suramadu ini sangat dirasakan oleh nelayan di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Nelayan tradisional yang belum dapat membuat manajemen perubahan ini menjadi korban dampak pembangunan. Lahan penangkapan berkurang sehingga hasil tangkapan ikan juga berkurang. Akan tetapi disisi lain, ada juga nelayan yang memanfaatkan pantai dekat jembatan Suramadu menjadi wisata perjalanan mengitari lorong jembatan Suramadu dari laut.

Kawasan kaki jembatan Suramadu menjadi sebuah anugerah bagi sebagian masyarakat yang aktif dan pandai menangkap peluang ekonomi. Jembatan Suramadu merupakan jembatan antar pulau pertama dan terpanjang di Indonesia.

Hal ini yang membuat daya tarik masyarakat berbondong-bondong untuk sekedar melihat jembatan hasil karya anak bangsa ini ketika jembatan diresmikan. Tidak hanya masyarakat lokal namun masyarakat luar Pulau Madura pun berdatangan untuk melihat jembatan Suramadu. Bahkan sampai saat ini masyarakat dari luar Pulau Madura masih banyak yang berdatangan khususnya pada hari libur. Mereka datang ke Madura untuk menikmati kuliner diantaranya Bebek Sinjay, Bebek Songkem, Ikan Bakar, dsb yang ada di sebelah barat jembatan Suramadu arah menuju kota Bangkalan.

Banyaknya lalu lalang kendaraan yang melintas di kawasan kaki jembatan Suramadu ini yang membuat mereka menggunakan lahan kawasan kaki jembatan Suramadu untuk berdagang dengan membangun kios. Sebagian besar pedagang kios menjual asesoris, pernak pernik, baju khas Madura yakni Sakera, batik Madura, kerajinan tangan dari kerang, dsb. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang kios di kawasan kaki jembatan Suramadu yang menyatakan bahwa:

“Barang dagangan yang saya jual adalah barang-barang yang khas dari Madura seperti gantungan kunci berlabel jembatan Suramadu, kerajinan dari kerang, batik Madura, layang-layang, arek, pecut, kuda lumping, makanan ringan khas Madura. Sebagian besar barang dagangan saya pasok dari Surabaya mbak”. (wawancara, hari Selasa tanggal 25 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di kawasan kaki jembatan Suramadu)

Selain itu ada juga beberapa warga yang membuat toilet dan mushola yang bersifat komersial karena belum adanya fasilitas permanen baik dari pengelola kawasan kaki jembatan Suramadu maupun pemerintah daerah. Sebenarnya lahan di kawasan jembatan Suramadu ini tidak diperuntukkan bagi masyarakat untuk berjualan atau memanfaatkan lahan tersebut. Untuk masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang tercatat sebagai pemilik kios itu sendiri yakni ada sekitar 30 orang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang menyatakan bahwa:

“Dampak positif dari segi ekonomi hanya dirasakan untuk mereka yang aktif seperti membuat usaha baru PKL dan wisata laut yang dibuat oleh nelayan di kawasan kaki jembatan Suramadu. Untuk masyarakat daerah Sukolilo Barat yang menjadi pedagang kios di Suramadu hanya sekitar 30 orang mbak. Kenapa tidak banyak? Karena usaha itu membutuhkan modal

yang tidak sedikit juga ya mbak”. (wawancara, hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Balai Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang)

Salah satu dari beberapa pemilik kios di kawasan kaki jembatan Suramadu pernah berprofesi sebagai sopir kol. Masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan sudah mulai jarang menumpang kol ke pelabuhan Ujung Kamal. Hal ini karena masyarakat yang mulai mempunyai kendaraan pribadi khususnya roda dua dan lebih memilih untuk menggunakan jasa penyebrangan lewat Suramadu. Di sisi lain, jembatan Suramadu juga tidak boleh dilewati oleh kol sehingga mereka jarang mendapatkan penumpang. Sekarang penumpang kol menuju pelabuhan Kamal tidak lebih banyak dari pada sebelum ada jembatan Suramadu. Pada akhirnya beberapa diantara mereka juga mencari alternatif pekerjaan lain dengan membangun kios di kawasan kaki jembatan Suramadu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu mantan sopir kol yang menyatakan bahwa:

“Dulu saya adalah sopir kol mbak. Saya berhenti menjadi sopir kol dan memilih untuk berjualan di sini”. (wawancara, hari Senin tanggal 25 Januari 2013 pukul 09.30 WIB, di kios kawasan kaki jembatan Suramadu)

Selain sopir kol ada juga beberapa pedagang kios di kawasan kaki jembatan Suramadu yang merupakan mantan pedagang kios di pelabuhan Ujung Kamal Bangkalan. Mereka memilih berpindah tempat berdagang karena pengunjung pelabuhan Ujung Kamal mulai sepi. Teman-teman sesama pedagang di pelabuhan Ujung Kamal pun banyak yang gulung tikar karena sepi pengunjung. Pedagang-pedagang yang ada di kawasan jembatan Suramadu ini tidak hanya berasal dari Madura saja tetapi juga ada pedagang dari luar Pulau Madura seperti Surabaya, Lamongan, Gresik, dan daerah lain yang dekat dengan Pulau Madura.

3. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Jembatan Suramadu menimbulkan dampak dalam tingkat pendapatan masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

Jembatan Suramadu membuat tingkat pendapatan nelayan menurun karena lahan penangkapan ikan semakin berkurang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh

Kepala Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang yang menyatakan bahwa:

“Sejak proses pembangunan jembatan Suramadu lahan penangkapan ikan semakin berkurang karena terhalang oleh tiang pancang Suramadu. Hal ini mengakibatkan hasil tangkapan menurun otomatis pendapatan juga menurun mbak”. (wawancara, hari Senin tanggal 17 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Balai Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang)

Di sisi lain jembatan Suramadu justru membawa berkah bagi masyarakat yang mempunyai inisiatif untuk berdagang di kawasan kaki jembatan Suramadu.

Sejak mereka membangun kios di sana tingkat pendapatan mereka meningkat.

Menurut salah satu pedagang *souvenir* dan pakaian di jembatan Suramadu menyatakan bahwa:

“Hasil jualan pakaian ini bisa meraup keuntungan 2-3juta/bulan dan hari-hari minggu bisa mencapai omzet penjualan 500 ribu dan untuk hari-hari biasa omzetnya kira-kira 100 ribuan mbak”. (wawancara, hari Senin tanggal 25 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di kios kawasan kaki jembatan Suramadu)

Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu mantan sopir kol yang menyatakan bahwa:

“Saya sangat bersyukur dengan adanya jembatan Suramadu. Kawasan Suramadu adalah tempat baru saya untuk nyari uang mbak. Rezeki berdagang di sini lebih banyak dari pada dulu ketika saya menjadi sopir angkot ya tentunya pendapatan saya meningkat. Rumah saya ini adalah hasil dari saya berjualan di kaki jembatan Suramadu”. (wawancara, hari Senin tanggal 25 Januari 2013 pukul 09.30 WIB, di kios kawasan kaki jembatan Suramadu)

Selain itu, ada juga nelayan yang mempunyai inisiatif untuk menyewakan perahunya kepada pengunjung Suramadu. Perahu tersebut dahulu berfungsi mencari ikan di laut lepas saja, tetapi setelah adanya jembatan Suramadu mempunyai fungsi lain sebagai *skoci* yaitu mengangkut orang yang ingin mengitari dan melihat jembatan Suramadu dari laut. Adapun tarif yang dikenakan setiap penumpang antara Rp.30.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-. Hal tersebut dilihat dari banyaknya penumpang yang naik ke perahu tersebut semakin banyak bahkan penuh biayanya murah yaitu Rp. 30.000,-/orang jika penumpang sedikit bisa mencapai Rp. 50.000,-/orang. Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu nelayan sekaligus penarik *skoci* yang menyatakan bahwa:

“Sebelumnya, saya mencari ikan tetapi kalau sedang ada angin laut dan air laut besar saya tidak melaut jadinya menganggur. Tetapi setelah ada jembatan Suramadu ini saya nganterin pengunjung jembatan untuk jalan-jalan liat jembatan dari laut. Pendapatan saya sekitar 150rb/hari biasa tapi kalau hari libur pendapatan saya bisa mencapai 500 ribu. Saya bersyukur karena jembatan ini membawa berkah dan tambahan rejeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Jadi selama ada jembatan ini saya kadang-kadang melaut tergantung kondisi, kalau lagi musim liburan kan banyak pengunjung jadi gak melaut tapi kalau tidak liburan saya melaut”. (wawancara, hari Senin tanggal 27 Januari 2013 pukul 09.45 WIB, di pantai kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura)

Masa awal dioperasikannya jembatan Suramadu masyarakat berbondong-bondong untuk memanfaatkan lahan di sepanjang kawasan kaki jembatan Suramadu. Dengan modal usaha yang tidak banyak mereka nekat membangun kios berharap mendapatkan peruntungan yang lebih banyak dari pekerjaan sebelumnya. Keadaan kios di kawasan kaki jembatan Suramadu pada saat itu kurang tertata dengan rapi. Kios yang mereka buat adalah kios non permanen dan cukup sederhana. Sebagian besar kios terbuat dari bilik bambu, tripleks dengan

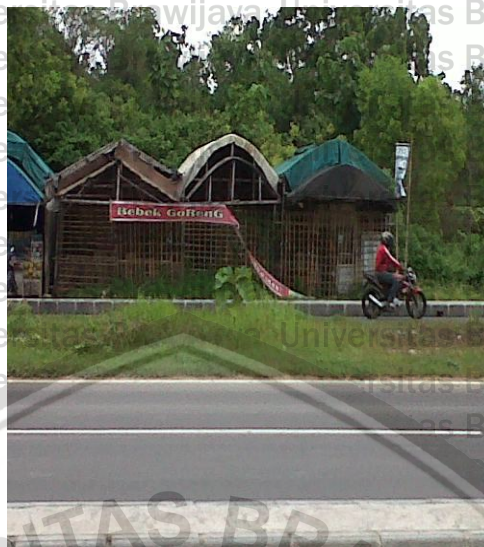
genteng terpal. Hal ini tidak menjadi masalah untuk mereka karena yang terpenting mereka dapat terlindungi dari panas dinginnya cuaca. Akan tetapi, dari hari ke hari kios-kios di sepanjang kawasan jembatan Suramadu ini semakin berkurang. Sebagian masyarakat usahanya tidak bertahan lama dan mereka pun gulung tikar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa :

“Saya pernah mencoba berjualan di kaki jembatan Suramadu ketika awal dioperasikannya jembatan Suramadu. Tapi rasanya pekerjaan ini tidak cocok untuk saya. Saya gak bakat dagang mungkin ya mbak. Saya menjadi pedagang itu tidak bertahan lama karena pelanggan sepi mbak jd saya rugi. Kemudian saya kembali menjadi nelayan”. (wawancara, hari Senin tanggal 27 Januari 2013 pukul 09.30 WIB, di kediamannya)

Pedagang kios di kawasan jembatan Suramadu yang gulung tikar ini disebabkan oleh karena barang dagangan antara pedagang satu dengan yang lainnya semuanya hampir sama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala bidang Trantib di kantor Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa:

“Mereka yang gulung tikar yang pengunjunnya katanya sepi itu karena dagangan mereka itu rata-rata semuanya sama mbak. Coba liat saja, kios 1 jualannya batik Madura, kios 3 bahkan sampe 5 kios yang lain itu ya jualannya juga batik Madura mbak. Misal ada pengunjung yang beli ya otomatis datengnya ke salah satu toko saja”. (wawancara, hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 09.00 WIB, di Kantor Kecamatan Labang)

Ada beberapa kios yang sudah tidak terpakai dan dibiarkan begitu saja sehingga merusak nilai estetika di kawasan tersebut. Pemilik kios sudah tidak lagi memperdulikan kios tersebut karena mencari pekerjaan baru dengan pendapatan yang lebih.



Gambar. 9 Kios yang sudah tidak terpakai

Meningkatnya pendapatan warga yang berjualan di kawasan kaki jembatan Suramadu hanya terjadi ketika jembatan Suramadu diresmikan. Akan tetapi, saat ini kios yang ada di jembatan Suramadu semakin hari pendapatannya semakin menurun karena sepi pelanggan sehingga mereka banyak yang gulung tikar. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang di kawasan kaki jembatan Suramadu menyatakan bahwa:

“Dulu saya adalah seorang petani. Terus mencoba berjualan di sini. Pendapatan meningkat hanya ketika jembatan Suramadu diresmikan. Masyarakat kan banyak yang belum tau Suramadu jadi banyak yang penasaran sehingga pengunjung juga ramai. Tapi sekarang pengunjung yang beli disini sudah mulai berkurang jadi pendapatan juga berkurang. Sekarang pendapatan per hari bisa cuma 30ribu-50ribu saja. Kadang juga saya merasa rugi tapi saya tetap berjualan karena saya tidak punya pekerjaan lain.” (wawancara, hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 15.00 WIB, di kios kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura)

Masyarakat madura sangat memelihara tali persaudaraan dan menganggap semua orang yang satu suku itu adalah kerabat dekatnya. Hal ini dibuktikan

dengan mereka tidak mengambil untung yang banyak bahkan jika saudaranya yang membeli barang dagangannya sendiri. Mereka memberikan barang dagangannya begitu saja kepada saudara yang meminta tanpa harus membayar.

Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerugian dalam berdagang.

2. Keterkaitan Dampak Sosial Ekonomi Dengan Kebijakan Pengembangan

Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura

a. Sumber Daya Kelembagaan

Keberadaan jembatan Suramadu memiliki dimensi politik, sosial maupun ekonomi. Kondisi pulau Madura yang masih tergolong dalam kategori daerah tertinggal merupakan salah satu pemicu pembangunan jembatan Suramadu sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu banyak potensi daerah di Madura yang belum digali dengan maksimal. Belum bisa berkembangnya potensi tersebut karena infrastruktur desa yang terisolir. Jembatan Suramadu kini telah mendorong pertumbuhan ekonomi Madura sampai 5-6%.

Hal ini sudah tentu jembatan Suramadu juga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi daerah yang ada di Madura salah satunya adalah Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang lokasinya dekat dengan jembatan.

Jembatan Suramadu ini diperkirakan akan bertahan selama 100 tahun kedepan. Keberhasilan proyek pembangunan jembatan Suramadu merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan swasta. Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan pemerintah luar negeri yakni Jepang dan China. Dalam melakukan kerjasama dengan Jepang dan China pembangunan jembatan Suramadu ini

mendapat bantuan dana pembangunan jembatan. Tentu saja bantuan dana pembangunan tersebut tidak diberikan semata-mata. Pemerintah Indonesia harus melunasi bantuan dana pinjaman tersebut sehingga pemerintah membuat jalan tol Suramadu. Hasil penarikan jalan tol tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat yang nantinya akan dipakai untuk melunasi hutang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kadiv Perencanaan Umum dan Program BPWS menyatakan bahwa:

“Jalan tol Suramadu itu dikelola oleh Jasa Marga. Hasil dari penarikan jalan tol tersebut dibuat untuk pelunasan hutang pembangunan jembatan. Oleh karena itu, untuk saat ini daerah tidak mendapatkan hasil jalan tol, hasil penarikan tersebut diserahkan ke pusat”. (wawancara, hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 pukul 10.30 WIB, di kantor BPWS)

Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah pusat mempunyai inisiatif yakni membentuk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) pada tahun 2010 yang bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai alternatif dalam menyokong pendapatan daerah. BPWS selaku Badan Pelaksana dibawah naungan institusi Presiden dibentuk untuk mengembangkan kawasan jembatan Suramadu khususnya di wilayah Madura. BPWS merupakan sebuah lembaga yang bersifat *ad hoc*/sementara ini akan bertugas selama kurang lebih 20-35 tahun. Oleh karena itu, keberadaan kantor BPWS ini sewaktu-waktu bisa pindah ke tempat lain.

Dalam mencapai keberhasilan visi dan misi BPWS merekrut tenaga kerja yang handal. Tenaga kerja BPWS terdiri atas PNS dan tenaga profesional dengan latar belakang pendidikan yang tinggi. Sumber daya manusia BPWS sangat potensial sehingga dapat membuat sejumlah program pengembangan kawasan Suramadu secara rinci dan detail dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

kondisi masyarakat Madura secara khusus sehingga tidak menyebabkan budaya Madura menjadi luntur. Selain itu BPWS dalam pengembangan wilayah di sisi Madura juga bekerjasama dengan pemerintah daerah di empat kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sumenep, Pamekasan dan Sampang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kadiv. Perencanaan dan Program BPWS yang menyatakan bahwa:

“BPWS tidak hanya bertanggungjawab untuk mengembangkan kawasan kaki Jembatan Suramadu di sisi Madura yang 600 ha tersebut. Akan tetapi juga berperan untuk meningkatkan dan pemerataan pertumbuhan sosial ekonomi di Madura secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan yang ada. Dalam hal ini Bapel BPWS melakukan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian/LPNK lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun swasta/masyarakat di wilayah Madura”. (wawancara, hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 pukul 10.30 WIB, di kantor BPWS)

b. Kebijakan dan Strategi

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah, pemahaman akan aspirasi masyarakat adalah suatu hal yang sangat esensi/mendasar. Aspirasi masyarakat mencerminkan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat dan dinamika kehidupan yang mencerminkan keinginan – keinginan masa depan. Dengan perkataan lain, aspirasi masyarakat menggambarkan kekuatan dan dinamika masyarakat. Aspirasi masyarakat dilakukan melalui dialog dan diskusi mengenai kondisi yang ada termasuk sosial ekonomi, sebab akibat perkembangan yang ada dan harapan – harapan dimasa yang akan datang baik dilihat dari kemajuan dan norma – norma.

Kadiv. Perencanaan dan Program BPWS menyatakan bahwa:

“Penyusunan kebijakan Pengembangan Wilayah Suramadu dilakukan secara komprehensif mempertimbangkan konteks pengembangan regional; sinergi dengan konsep pengembangan Pulau Madura sesuai dengan daya

dukung lingkungan dan kondisi sosial ekonomi”. (wawancara, hari Senin tanggal 08 April 2013 pukul 10.30 WIB, di kantor BPWS)

Dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang agraris dan religius serta tingkat perkembangan kawasan-kawasan yang masih terbatas, dan sesuai dengan kebijakan dan strategi maka tahapan pengembangan wilayah suramadu dibagi dalam 3 tahapan, yaitu:

- a. Tahap Pertama: Penyiapan rencana kajian infrastruktur serta penyiapan SDM
- b. Tahap Kedua: mendorong peran swasta untuk pengembangan kegiatan sektor produktif dan industri serta infrastruktur yang layak (*financially feasible*)
- c. Tahap ketiga: Mendorong dan memantapkan pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan investasi swasta.

Sejalan dengan hal tersebut kerangka dasar pengembangan wilayah Suramadu kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) merupakan kawasan yang berperan sebagai simpul transportasi untuk menghubungkan Jembatan Suramadu dengan infrastruktur regional Pulau Madura. Selain itu, dalam mengoptimalkan perkembangan ekonomi pada wilayah Madura, Pada kawasan ini selain menata simpul transportasi juga dilakukan pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa skala regional, pariwisata. Kadiv. Perencanaan dan Program menyatakan bahwa:

“Mengingat lokasinya, kawasan ini difungsikan sebagai pintu gerbang Pulau Madura melalui darat sehingga perlu dikembangkan sebagai etalase dan pusat informasi ekonomi Pulau Madura, termasuk potensi wisata dan kondisi sosial budaya Madura. Dalam kaitannya dalam proses pelaksanaan tugas BPWS, kedudukan kebijakan dan strategi Pengembangan Wilayah Suramadu adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan Pembangunan dengan Penganggaran agar program dan kegiatan yang akan dikembangkan oleh BPWS dalam melaksanakan pengembangan

wilayah Suramadu dapat saling menguatkan dengan kebijakan pengembangan kabupaten/kota di wilayah Suramadu dan Provinsi Jawa Timur”. (wawancara, hari Senin tanggal 08 April 2013 pukul 10.30 WIB, di kantor BPWS)

Sejalan dengan misi pengembangan wilayah Suramadu, kebijakan pengembangannya adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pengembangan wilayah Suramadu dilakukan secara efektif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan antar wilayah.
- b. Pengembangan wilayah dilakukan melalui pengembangan kawasan – kawasan dan sektor, didukung oleh sumberdaya alam yang ada serta mempunyai daya tumbuh untuk mendorong perkembangan ekonomi dan kesempatan kerja.
- c. Pengembangan kawasan didukung oleh pembangunan Sumberdaya Manusia untuk mendukung kegiatan sektor dan persiapan industrialisasi.
- d. Pengembangan infrastuktur saling menguatkan dengan pengembangan kawasan agar sektor dapat berkembang secara efektif dan agar kelancaran arus barang antar kawasan serta kesatuan wilayah Suramadu dapat diwujudkan.
- e. Pengembangan infrastruktur dan kawasan diarahkan pada peningkatan kualitas tata ruang dan pembangunan berkelanjutan.
- f. Pembangunan infrastruktur dan kawasan diupayakan melibatkan peran swasta.
- g. Pengembangan sistem operasi infrastruktur dimaksudkan agar infrastruktur yang terbangun dapat difungsikan sesuai dengan umur teknisnya.
- h. Pengembangan sistem perizinan yang cepat dan transparan untuk meningkatkan daya tarik kawasan terhadap investor dan sebagai satu kesatuan dengan promosi kawasan.

Adapun strategi untuk menjalankan kebijakan pengembangan wilayah Suramadu tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. **Kebijakan I:** Percepatan pengembangan wilayah Suramadu dilakukan secara efektif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan antar wilayah, ditempuh strategi sebagai berikut:
 - i. Memilih kawasan yang mempunyai potensi sumberdaya alam dan atau lokasi strategis yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan sektor kunci, yaitu sektor yang mempunyai basis yang kuat dan keterkaitan yang kuat dengan sektor lain dan atau kawasan lain.
 - ii. Memilih kawasan yang potensial didasarkan pada Rencana Tata Ruang (RTR) yang terkait dengan wilayah Suramadu agar dapat optimal mendukung pengembangan wilayah Suramadu.

b. Kebijakan II: Pengembangan wilayah dilakukan melalui pengembangan kawasan – kawasan dan sektor, didukung oleh sumberdaya alam yang ada serta mempunyai daya tumbuh untuk mendorong perkembangan ekonomi dan kesempatan kerja, ditempuh strategi sebagai berikut:

- i. Mengembangkan sektor kunci dengan mengutamakan peran masyarakat dan swasta.
- ii. Menyiapkan insentif bagi investor melalui dukungan infrastruktur yang baik dan kemudahan perizinan serta keamanan berusaha.

c. Kebijakan III: Pengembangan kawasan didukung oleh pembangunan Sumberdaya Manusia untuk mendukung kegiatan sektor dan persiapan industrialisasi, ditempuh strategi sebagai berikut:

- i. Mengembangkan Sumberdaya Manusia sesuai dengan kondisi demografi dan nilai positif budaya masyarakat.
- ii. Mengembangkan Sumberdaya Manusia dengan menyelaraskan dan saling menguatkan dengan pengembangan sektor produksi sehingga masyarakat khususnya masyarakat Madura dapat berperan aktif serta dipersiapkan menjadi masyarakat industri.
- iii. Meningkatkan keterampilan Sumberdaya Manusia yang saling menguatkan dengan akhlak dan mental serta peningkatan kemampuan disiplin kerja dan jiwa wirausaha.

d. Kebijakan IV: Pengembangan infratsruktur saling menguatkan dengan pengembangan kawasan agar sektor dapat berkembang secara efektif dan agar kelancaran arus barang antar kawasan serta kesatuan wilayah Suramadu dapat diwujudkan, ditempuh strategi sebagai berikut:

- i. Memperkuat keterkaitan antar kawasan atau lokasi sektor produksi dengan permukiman dan sumber bahan baku serta dengan lokasi pemasaran.
- ii. Menyesuaikan kapasitas dan sistem infrastruktur dengan intensitas persebaran permukiman dan volume arus barang.
- iii. Mengembangkan infrastruktur secara sistematis sehingga dapat terintegrasi dan efisien mendukung kawasan – kawasan baik yang dikelola BPWS maupun untuk mendukung kawasan lain di wilayah Suramadu.

e. Kebijakan V: Pengembangan infrastruktur dan kawasan diarahkan pada peningkatan kualitas tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, ditempuh strategi sebagai berikut:

- i. Penyiapan *Detail Engineering Design* (DED) infrastruktur didasarkan pada Rencana Tata Ruang dengan memperhatikan kelestarian alam sekitar.
- ii. Pembangunan infrastruktur didasarkan pada studi AMDAL.
- iii. Rencana tata ruang disusun berdasarkan prinsip berkelanjutan dan terpadu baik pada skala kawasan dan lokal (*site plan*) berdasarkan daya dukung dan sejalan dengan tata ruang wilayah kota/kabupaten serta dapat dimanfaatkan sebagai rujukan pengembangan infrastruktur dan pengendalian pembangunan.

f. Kebijakan VI: Pembangunan infrastruktur dan kawasan diupayakan bertumpu pada peran serta masyarakat dan swasta, ditempuh strategi sebagai berikut:

- i. Mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur yang secara finansial layak (*financially feasible*) melalui rencana pengembangan wilayah (Rencana Induk, Rencana Tata Ruang) yang baik dan dapat memberikan kepastian terhadap arah pengembangan.
- ii. Investasi pemerintah diutamakan untuk membangun infrastruktur yang tidak layak secara finansial tapi bermanfaat untuk mendorong perkembangan kawasan (*economically viable*).
- iii. Investasi swasta dibidang infrastruktur dalam kawasan diupayakan saling menguatkan dengan investasi pemerintah untuk meningkatkan akumulasi investasi dalam wilayah Suramadu.

g. Kebijakan VII: Pengembangan sistem operasi infrastruktur dimaksudkan agar infrastruktur yang terbangun dapat difungsikan sesuai dengan umur teknisnya, menempuh strategi sebagai berikut:

- i. Mengembangkan sistem operasi dan pemeliharaan infrastruktur.
- ii. Meningkatkan keterampilan staff untuk pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur.
- iii. Menyediaan alat – alat pengoperasian infrastruktur.
- iv. Mengembangkan sistem keamanan operasi infrastruktur.

h. Kebijakan VIII: Pengembangan sistem perizinan yang cepat dan transparan untuk meningkatkan daya tarik kawasan terhadap investor dan sebagai satu kesatuan dengan promosi kawasan, ditempuh dengan strategi sebagai berikut:

- i. Bekerjasama dengan daerah agar sistem perizinan dapat dioperasionalkan.
- ii. Memilih dan memantapkan perizinan melalui pengembangan sistem dan prosedur perizinan dari kegiatan - kegiatan yang terkait dengan pembangunan fisik dan strategis untuk percepatan pengembangan wilayah.
- iii. Mengembangkan informasi perizinan yang satu kesatuan dengan informasi rencana dan ketentuan - ketentuan pembangunan kawasan melalui media yang dapat diakses secara luas oleh calon investor.

3. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi

Madura

a. Efektifitas Kinerja Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Sisi

Madura

Efektifitas adalah memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pencapaian tujuan secara tepat atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas merupakan salah satu indikator sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian serangkaian tujuan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan kinerja yang efektif maka disusunlah suatu rencana kerja sebagai pedoman dalam bertindak secara sistematis dan terarah.

Penilaian efektifitas itu sendiri didasarkan atas tujuan program sesuai dengan keinginan pembuat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memperoleh efektifitas tersebut penyusunan kebijakan Pengembangan Wilayah Suramadu, telah dilakukan dialog dengan tokoh – tokoh masyarakat di wilayah Madura yang secara garis besar mencakup 3 elemen, yaitu Bapa' Ebu,

Guru Rato. Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan dengan tokoh – tokoh masyarakat baik yang ada di Madura maupun diperantauan, LSM, Perguruan

Tinggi dan Cendekiawan serta dengan Pemerintah Daerah (Bupati, Bappeda dan Dinas – Dinas terkait). Hal ini dilakukan karena pada awal tahun 2012 BPWS

sempat mendapatkan protes dari masyarakat berupa aksi demo yang diwakili oleh organisasi masyarakat Madura untuk membubarkan BPWS. Kebijakan BPWS

dinilai mendiskriminasi masyarakat Madura. Dari dialog tersebut, diperoleh aspirasi sebagai berikut:

- a. Pembangunan industri saling menguatkan dengan pembangunan SDM agar masyarakat Madura dapat berperan nyata,
- b. Pembangunan industri tidak merusak ekonomi masyarakat terutama di pedesaan,
- c. Pembangunan harus sejalan dengan nilai – nilai agama Islam dan budaya Madura,
- d. Pembangunan tidak merusak lingkungan.

Akumulasi dari aspirasi tersebut membuahkan kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari sebuah lembaga/organisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kadiv Perencanaan dan Program BPWS menyatakan bahwa:

“Pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu khususnya di sisi Madura terlebih dahulu memprioritaskan untuk membangun SDM di Madura. Hal ini dilakukan agar tidak banyak menggosur pelaku masyarakat lokal sehingga masyarakat mereka menjadi tidak termajinalkan oleh masyarakat luar daerah. Dengan demikian Masyarakat lokal nantinya diharapkan yang akan menjadi *leader* dalam pembangunan daerahnya. BPWS disini hanya memfasilitasi dalam pengembangan kawasan Suramadu baik di sisi Surabaya maupun Madura”. (wawancara, hari Senin tanggal 08 April 2013 pukul 10.30 WIB, di kantor BPWS)

Pada tahun anggaran 2011-2012, sejumlah program percepatan secara riil mulai dilakukan. Program-program tersebut diantaranya adalah:

- Desain Pembangunan rest area di lahan KKJSM seluas 40 ha dan rencana pembangunan masjid ikon Madura di pintu masuk KKJSM.
- Penjajagan dan promosi investasi dengan pihak asing terus diretas. Diantaranya dengan Gubernur Provinsi Okinawa Jepang, China dan sejumlah Negara manca Asia Negara lainnya.
- Pemetaan Potensi Wilayah.
- Konsultasi Publik.
- Program Pemberdayaan Masyarakat, seperti: Pelatihan UMKM, Pelatihan Pemanfaatan Hutan Mangrove, Pelatihan Kriya Logam, Pelatihan IT untuk pondok pesantren, dll.

Program percepatan yang telah dilakukan tersebut tidak sepenuhnya membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kadiv.

Perencanaan dan Program BPWS yang menyatakan bahwa:

“Untuk program tahun 2011-2012 sudah dijalankan. Hasil yang diinginkan sudah tercapai walaupun ada kendala dalam pencapaian misalnya tentang peninjauan investasi. Akan tetapi, BPWS akan tetap berusaha untuk konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab”. (wawancara, hari Senin tanggal 08 April 2013 pukul 10.30 WIB, di kantor BPWS)

b. Efisiensi Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi

Madura

Banyak usaha yang diperlukan untuk membuat kebijakan pengembangan kawasan jembatan Suramadu khususnya di sisi Madura menjadi efisien. Akan tetapi, dalam usahanya ada beberapa kendala sehingga menjadi kurang efisien dalam pengembangan kawasan jembatan Suramadu sehingga sampai saat ini belum terealisasi. Belum terealisasinya pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu ini khususnya di sisi Madura membuat masyarakat kecewa sehingga sempat terjadi demo untuk membubarkan BPWS. Kekecewaan masyarakat Madura juga dikarenakan oleh rencana-rencana BPWS yang dinilai mendiskriminasi. Dalam kaitannya tentu terdapat pengaruh politik yang menjadi tameng dalam aksi masyarakat tersebut. Padahal BPWS telah membuat rencana dan strategi pengembangan kawasan jembatan Suramadu dengan sedemikian rupa sesuai dengan nilai-nilai budaya Madura.

BPWS juga telah mempersiapkan solusi dini ketika pengembangan kawasan tersebut terealisasi untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan, seperti

contohnya: kegiatan pemberdayaan SDM. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kadiv Perencanaan Umum dan Program BPWS menyatakan bahwa:

“Belum ada pengembangan secara fisik karena adanya banyak faktor. Pengembangan kawasan jembatan Suramadu khususnya di sisi Madura harus melalui langkah-langkah mulai dari membuat rencana induk, sosialisasi dan kampanye publik. Kegiatan seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 tahun. Belum lagi banyak menghadapi dinamika-dinamika politik. Target penyelesaian pembangunan yakni kurang lebih 20-35 tahun”. (wawancara, hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 pukul 10.30 WIB, di kantor BPWS)

c. Kecukupan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura

Lahan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai realisasi yang telah direncanakan oleh pihak BPWS. Lahan yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu di sisi Madura yakni sekitar 600 ha sebagai *rest area*, pusat industri, perdagangan PKL dan permukiman warga khas Madura yakni “Taneyan Lanjheng”. Kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan kaki jembatan diatas lahan Madura ini dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan termasuk dalam zona daerah pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu. Jika Pengembangan kawasan tersebut terealisasi tentu juga akan mempengaruhi pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Pembebasan lahan saat ini yang menjadi faktor penghambat pengembangan kawasan jembatan Suramadu. BPWS telah melakukan *survey* terhadap harga lahan di daerah yang akan menjadi pengembangan kawasan jembatan Suramadu tersebut sesuai dengan NJOP.

Sebagian besar lahan yang akan dipakai untuk pengembangan kawasan jembatan Suramadu itu milik masyarakat di Kecamatan Labang. Sampai pada saat ini pemilik lahan tidak ingin melepas lahannya karena mereka takut tidak dapat menemukan tanah pengganti yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala bidang Trantib di Kecamatan Labang Kabupaten

Bangkalan yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat menginginkan harga diluar batas harga yang telah ditentukan karena ketakutan mereka ketika kesulitan mendapatkan tanah pengganti. mbak. Sementara harga tanah dari hari ke hari mengalami kenaikan. Ketika mereka ingin membeli tanah pengganti, kemudian harga tanah lebih mahal. Jadi, mereka takut rugi juga mbak”. (wawancara, hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 pukul 9.45 WIB, di kantor Kecamatan Labang)

Melihat kondisi tersebut peneliti melihat bahwa tentu saja masyarakat bukan hanya takut tidak mendapatkan tanah pengganti. Sebagian besar lahan yang hendak dibeli untuk pengembangan kawasan jembatan Suramadu di sisi Madura itu berupa persawahan. Bertani sudah tentu merupakan mata pencaharian mereka selama ini. Dengan demikian, mereka belum siap untuk menanggalkan pekerjaan sebagai petani karena mereka pun memikirkan pekerjaan pengganti apa yang sesuai dengan keadaan mereka ketika lahan persawahan tersebut dijual.

d. Pemerataan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura

Pemerataan dari kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Hal ini seperti

yang disampaikan oleh Kadiv. Perencanaan dan program BPWS yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan pembangunan Jembatan Suramadu bertujuan untuk menyokong pertumbuhan di Madura bukan hanya di kawasan kaki jembatan Suramadu saja. Oleh karena itu maka dibentuklah Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk memfasilitasi pertumbuhan di Madura yakni secara merata di empat kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Ketentuan zona 600 ha untuk pengembangan kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Madura dalam proses pembangunan secara fisik meliputi *rest area*, kawasan industri, perumahan dan wisata. Sedangkan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) disesuaikan dengan potensi daerah. Pengembangan SDM diperlukan dalam menunjang pembangunan kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Madura yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan”.(wawancara, hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 pukul 10.30 WIB, di kantor BPWS)

Hal tersebut dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius didukung oleh tingkat kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik, peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan dalam mendukung ekonomi daerah dan investasi, pembangunan infrastruktur. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kadiv. Perencanaan dan Program BPWS yang menyatakan bahwa:

“Melihat dampak sosial ekonomi dari pembangunan Jembatan Suramadu khususnya di Madura berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia BPWS telah mendistribusikan program SDM yang berupa Pelatihan UMKM, Pelatihan Pemanfaatan Hutan Mangrove, Pelatihan Kriya Logam, Pelatihan IT untuk pondok pesantren, dll. Iya, Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang yang termasuk dalam zona KKJSM juga menjadi target pengembangan SDM. Dalam hal ini pengembangan dan penyiapan SDM untuk pengembangan kawasan secara fisik agar mereka tidak termajinalkan ketika mereka memasuki era industrialiasi.” (wawancara, hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 pukul 10.30 WIB, di kantor BPWS)

Dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan pemerataan yang strategis dan berimbang dengan mempertimbangkan aspek tata ruang dan lingkungan,

peningkatan pendayagunaan sumber daya alam meliputi pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan) yang berorientasi kemakmuran rakyat, peningkatan dan melestarikan serta mengembangkan potensi budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan.

e. Responsifitas Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura

Respon masyarakat yang kurang yakni terlihat pencurian fasilitas infrastruktur. Pencurian fasilitas yang di kawasan Suramadu sudah terjadi semenjak tahun 2009 yakni pada saat jembatan Suramadu dioperasikan seperti pencurian baut jembatan Suramadu dan lampu-lampu di sepanjang jalan akses jembatan Suramadu. Kasus pencurian terulang kembali pada beberapa bulan yang lalu yakni sekitar bulan Desember 2012. Kabel *main power* jembatan Suramadu di pilar 18 telah dicuri sehingga menyebabkan beberapa lampu di jembatan Suramadu bagian Selatan mati. Pencuri nekat melakukan perbuatan tersebut karena tergiur oleh harga kabel yang cukup mahal. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Humas BPWS yang menyatakan bahwa:

“Kabel main power yang dicuri berada di bawah jembatan yang ada di pilar 18. Panjang kabel 30 cm dengan diameter sekitar 10 cm. Isi kabel adalah tembaga super dengan high kualitas. Harga per meternya sekitar Rp 500 ribu. Sehingga 30 meter kabel yang dicuri nilainya sekitar Rp 15 juta. Mahalnya harga kabel tersebut, karena di dalam kabel tersebut terhadap lima jenis kabel tembaga yang dipakai untuk main power arus listrik penerangan di Jembatan Suramadu. Per meter kabel, jika ditimbang beratnya mencapai sekitar 12,5 kilogram. Jadi total berat kabel yang dicuri mencapai 375 kilogram” (wawancara, tanggal 14 Februari 2013 melalui <http://bangka.tribunews.com> diakses pada tanggal 30 Februari 2013)

Dan pada saat ini jalan akses pertama di kawasan sisi Madura pada malam hari gelap karena tidak ada penerangan jalan. Jika ini terus terjadi maka akan sangat merugikan bahkan dapat membawa bencana baik itu bagi jembatan Suramadu itu sendiri maupun bagi keselamatan pengguna jalan akses dan jembatan Suramadu. Walaupun keamanan sudah dilakukan dengan pemasangan CCTV di beberapa sudut dan dilakukan patroli keliling di daerah jalan raya jembatan Suramadu. Akan tetapi ada beberapa video CCTV ditemukan mati sehingga keamanan kurang terjamin dengan baik.

f. Ketepatan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi

Madura

Kebijakan pengembangan wilayah Jembatan Suramadu sisi Madura disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi daerah terdampak. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat berguna dan sesuai bagi masyarakat Madura termasuk di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Hal ini terlihat dari realisasi pada tahun anggaran 2011-2012, sejumlah program percepatan pengembangan wilayah Jembatan Suramadu secara riil telah dilakukan. Program-program tersebut diantaranya adalah:

- Desain Pembangunan rest area di lahan KKJSM seluas 40 ha dan rencana pembangunan masjid ikon Madura di pintu masuk KKJSM.
- Penjajagan dan promosi investasi dengan pihak asing terus diretas. Diantaranya dengan Gubernur Provinsi Okinawa Jepang, China dan sejumlah Negara manca Asia Negara lainnya.
- Pemetaan Potensi Wilayah.
- Konsultasi Publik.
- Program Pemberdayaan Masyarakat, seperti: Pelatihan UMKM, Pelatihan Pemanfaatan Hutan Mangrove, Pelatihan Kriya Logam, Pelatihan IT untuk pondok pesantren, dll.

D. Pembahasan Data Fokus

Pemerintah dalam suatu negara memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan kebutuhan publik. Permasalahan yang ada dalam masyarakat sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mencari solusi yang tepat.

Munculnya kebijakan merupakan suatu langkah pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kebijakan tersebut pada hakekatnya mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang nantinya akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kebijakan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena kebutuhan yang semakin kompleks. Kebijakan dalam administrasi publik merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kebijakan juga memiliki sanksi apabila kebijakan-kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.

Salah satu usaha pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang lebih baik yakni melalui kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan tersebut bisa berupa kebijakan fisik maupun kebijakan non fisik. Pembangunan secara fisik itu meliputi pembangunan secara material, misalnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, dsb dalam merangsang dan memperlancar kegiatan masyarakat. Sedangkan pembangunan non-fisik itu sendiri berhubungan dengan kemampuan atau potensi sumber daya manusia (SDM). Peneliti menilai bahwa hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Siagian tentang pembangunan.

Pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam kategori pembangunan fisik sangat penting untuk menunjang pembangunan lainnya seperti pembangunan sosial maupun ekonomi. Jembatan Suramadu adalah infrastruktur yang merujuk pada sistem fisik fasilitas publik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi sesuai dengan pernyataan Grigg tentang infrastruktur. Kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan Infrastruktur terbukti dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2003 yang merupakan sebuah penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura.

Jembatan Surabaya-Madura disingkat menjadi jembatan Suramadu merupakan jembatan antar pulau terpanjang yang dibangun di Indonesia.

Jembatan yang menghubungkan antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa ini panjangnya kurang lebih 5,4 km dengan memakan biaya sekitar 4,6 triliun.

Adapun definisi jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk melewatkan suatu massa atau *traffic* lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan Suramadu juga sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan sebagai prasarana transportasi darat yang mempunyai kelengkapan bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas di atas permukaan laut.

1. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu Di Desa Sukilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

Pembangunan jembatan Suramadu bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan membawa dampak dalam beberapa aspek seperti aspek ekonomi maupun bidang sosial yang bersifat positif dan negatif. Dalam bidang sosial menyangkut kelancaran arus transportasi, mobilitas sosial, pendidikan dan peradaban. Sedangkan dalam bidang ekonomi menyangkut kegiatan dan tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kodoatie (2005:269) menjelaskan bahwa pembangunan jalan baru akan berdampak pada beberapa aspek, antara lain:

- a. Membuka kesempatan kerja. Dengan adanya jembatan Suramadu masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang dapat melihat kesempatan serta peluang kerja baru yang semakin besar. Lahan kawasan kaki jembatan Suramadu khususnya di sisi Madura telah digunakan sebagai lahan paguyuban PKL, nelayan memanfaatkan daerah pantai sebagai wisata laut dan banyak masyarakat yang mencari peluang kerja ke daerah lain khususnya di Surabaya sebagai satpam, buruh pabrik dan pedagang.
- b. Membuka akses bagi perumahan pedesaan terhadap kesempatan kerja dan pusat kesehatan, perkantoran, pendidikan dan sebagainya. Masyarakat desa pada umumnya adalah masyarakat yang daerahnya pada umumnya terisolasi dan pekerjaannya masih mengandalkan alam. Hal ini sama seperti kondisi masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Jembatan Suramadu telah meningkatkan mobilitas sosial masyarakat yang memudahkan mereka untuk mendapatkan akses

penghidupan yang semakin lengkap sehingga angka harapan hidup juga semakin tinggi. Masyarakat dapat dengan mudah menjangkau fasilitas pendidikan di perkotaan yakni SMA Negeri 19 Surabaya yang berlokasi di daerah kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya. Dan ada beberapa nelayan yang memperoleh *training* dan sosialisai dari BPWS dalam memanfaatkan pesisir pantai dengan strategi ekowisata mangrove sehingga menambah wawasan.

c. Meningkatkan ikatan sosial integrasi nasional. Jembatan Suramadu telah membuat interaksi tanpa sekat antara masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan masyarakat kota. Integrasi masyarakat mulai terlihat dari adanya imitasi masyarakat desa ini terhadap budaya masyarakat kota baik itu menyangkut perilaku, gaya hidup dan nilai-nilai yang ada.

d. Meningkatkan pasokan barang-barang konsumsi dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya jembatan Suramadu membuat kemudahan dan kelancaran terhadap akses transportasi sehingga juga berpengaruh pada kemudahan dan mereduksi biaya dalam distribusi barang dan jasa. Hal ini terbukti dengan banyaknya PKL dan masuknya pedagang sayur dari Surabaya ke Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan harga barang dagangan yang lebih murah.

e. Pembangunan pertanian dengan hasil yang lebih tinggi, perubahan guna lahan, peningkatan penggunaan kebutuhan pertanian yang lebih modern, dan peningkatan produksi untuk dipasarkan. Dengan adanya jembatan

Suramadu terdapat perubahan guna lahan di Kecamatan Labang dari yang awalnya lahan pertanian menjadi lahan untuk membangun usaha kecil-kecilan seperti bengkel, kios dan warung.

Berdasarkan paparan diatas, sosial ekonomi dalam masyarakat juga menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan hidup. Maslow (1994:43) mengelompokkan lima tingkat kebutuhan manusia, yaitu:

a. Kebutuhan dasar fisiologis/kebutuhan fisik (*Physiological Needs*). Hal

ini merupakan kebutuhan masyarakat yang diperlukan untuk mempertahankan hidup seperti kebutuhan makanan, istirahat, udara segar, air, vitamin, dsb. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer yang memang harus terpenuhi. Dalam memperjuangkan kebutuhan hidup primernya masyarakat mencari peluang kerja dari adanya jembatan Suramadu baik di kawasan kaki jembatan. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan kemudahan akses transportasi dengan mencari peluang kerja ke daerah lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan agar bukan hanya kebutuhan primer yang terpenuhi namun juga kebutuhan sekunder dan tersier.

b. Kebutuhan akan rasa aman (*Safety Needs*). Hal ini merupakan

kebutuhan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan secara pasti, kontinyu, dan teratur. Seseorang mudah terganggu dalam situasi yang dirasakan sebagai situasi yang membahayakan, situasi yang kacau, tidak menentu, mereka mudah menarik diri dalam situasi asing baginya.

Seseorang membutuhkan perlindungan yang memberi rasa aman.

Kehadiran jembatan Suramadu mungkin membuat kekhawatiran masyarakat baik itu dalam bersaing dengan masyarakat luar daerah maupun dalam mempertahankan *culture*. Oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah badan pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk membangun Madura khususnya mengembangkan kawasan jembatan Suramadu baik dalam memberdayakan SDM maupun pembangunan infrastruktur yang juga bekerjasama dengan pemerintah daerah di Madura. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak termajinalisasikan oleh masyarakat luar daerah dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.

c. Kebutuhan untuk mencintai dan dicintai (*love needs*). Hal ini merupakan kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan dorongan atau keharusan baginya untuk mendapatkan tempat dalam satu kelompok dimana mereka memperoleh kehangatan perasaan dan hubungan dengan masyarakat lain secara umum. Jembatan Suramadu membuat masyarakat harus lebih bekerjasama dan kompak dalam mempertahankan nilai-nilai dan *culture* yang ada.

d. Kebutuhan akan harga diri (*Estem Needs*). Hal ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan tuntutan pengalaman individu sebagai pribadi yang bernilai, sebagai manusia yang berarti dan memiliki martabat. Pemenuhan kebutuhan ini akan menimbulkan rasa percaya diri sendiri, menyadari kekuatan-kekuatannya, merasa dibutuhkan dan

mempunyai arti bagi lingkungannya. Pendidikan merupakan salah satu saluran untuk meningkatkan harga diri dalam masyarakat karena dengan memiliki pengetahuan dan wawasan luas mereka akan merasa terbuka secara global dan tidak teremehkan. Dengan adanya jembatan Suramadu untuk meningkatkan harga dirinya Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan terlihat dari ada pembangunan dalam bidang sumber daya manusia yakni mendirikan dua sekolah negeri yakni SMKN dan SMPN.

e. Kebutuhan akan aktualisasi diri (*Self Actualization*). Hal ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan pemberian dorongan terhadap setiap individu untuk mengembangkan atau mewujudkan seluruh potensi dalam dirinya. Dorongan ini merupakan dasar perjuangan setiap individu untuk merealisasikan dirinya, untuk menentukan dirinya/identitasnya, dan menjadi dirinya sendiri. Kebutuhan ini tumbuh secara wajar dalam diri setiap manusia. Dengan adanya jembatan Suramadu pemenuha akan aktualisasi diri terlihat dari masyarakat yang aktif dan kreatif dalam mencari peluang usaha seperti menjadi PKL di kawasan jembatan Suramadu dengan berdagang *souvenir* khas Madura, menjual makanan dan minuman, membuka bengkel, jasa toilet/mushola dan membuat wisata di pantai dekat jembatan Suramadu.

Kebijakan pembangunan jembatan Suramadu membuat dampak baik itu dalam aspek sosial maupun ekonomi masyarakat di Madura termasuk bagi Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Hal ini karena dalam

setiap kebijakan yang dibuat pasti akan menimbulkan efek-efek atau konsekuensi disebut sebagai dampak kebijakan. Jembatan Suramadu telah membawa dampak baik itu yang diinginkan yang bersifat positif maupun yang tidak diinginkan yang bersifat negatif bagi aspek sosial maupun ekonomi. Akibat-akibat dari jembatan Suramadu bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur. Dampak kebijakan menurut Winarno adalah sebagai berikut:

Dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. Dalam hal ini ada dua kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan yaitu dampak yang diinginkan (berkonotasi positif) dan dampak yang tidak diinginkan (berkonotasi negatif). Dampak kebijakan juga dibedakan antara *Policy Impact Outcomes* dan *Policy Output*. *Policy Out Comes* adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilakukannya suatu kebijakan. Sedangkan *Policy Output* adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan dari pengertian ini, maka dampak mengacu pada adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan (Winarno, 2007:23).

a. Dampak dalam Bidang Sosial

1. Mobilitas Sosial

Sebelum ada Jembatan Suramadu terdapat dampak yang ditimbulkan dari segi mobilitas sosial bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yakni masyarakat belum bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat di Pulau Jawa khususnya wilayah Surabaya. Hal ini mengakibatkan laju transformasi dalam bidang pendidikan, perputaran ekonomi, kesehatan, informasi, dsb belum dapat terjangkau dengan mudah. Akses penghidupan yang belum mencukupi dan terfasilitasi dengan baik karena pergerakan masyarakat kurang efektif dan efisien. Dengan demikian jika melihat

model pertumbuhan Rostow yang dikutip oleh Budiman (1995:26) dalam konsep pembangunan, masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang termasuk dalam kategori masyarakat tradisional yang memiliki kelambanan menuju modernitas. Selain itu, jika melihat pada dampak sosial pembangunan infrastruktur secara langsung juga dapat mempengaruhi perubahan sosial seperti yang diungkapkan oleh Soekanto (1987:20) kurangnya interaksi atau terhambatnya kontak dengan kebudayaan masyarakat luar juga menjadi faktor penghambat dalam perubahan sosial yang lebih baik sehingga masyarakat masih menjadi masyarakat tradisional yang kurang memiliki banyak wawasan.

Dampak dari adanya jembatan Suramadu dari segi mobilitas sosial membawa dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Dampak positif berkaitan dengan laju transformasi dalam bidang pendidikan, perputaran ekonomi, kesehatan, informasi, dsb lebih efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu. Jembatan Suramadu sangat membawa manfaat bagi masyarakat desa ini yang akses kebutuhan hidupnya kurang terpenuhi.

Jembatan Suramadu merupakan sebuah anugerah karena langsung menghubungkan ke daerah perkotaan yakni kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang mempunyai kelengkapan akses kebutuhan hidup. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah memasok akses kebutuhan hidupnya karena adanya jembatan Suramadu. Sedangkan dampak negatif berkaitan dengan semakin banyaknya peredaran narkoba, kriminalitas dan lokalisasi. Dengan demikian jika

melihat model pertumbuhan Rostow yang dikutip oleh Budiman (1995:26) dalam konsep pembangunan, dapat dikatakan bahwa intervensi pemerintah dalam pembangunan jembatan Suramadu membuat masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang ini menjadi masyarakat yang naik level menjadi masyarakat pra kondisi lepas landas. Hal ini karena intervensi pemerintah dalam pembangunan mengakibatkan kemajuan dalam mobilitas sosial. Selain itu, jika melihat pada dampak sosial pembangunan infrastruktur secara langsung juga dapat mempengaruhi perubahan sosial seperti yang diungkapkan Soekanto (1987:20) terjalannya interaksi atau kontak dengan kebudayaan masyarakat luar daerah yakni Surabaya juga menjadi faktor pendorong dalam perubahan sosial yang ada di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

Mobilitas Sosial (*social mobility*) diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata satu ke strata lainnya. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa bentuk mobilitas sosial yang dapat terjadi di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yakni meliputi mobilitas gerak sosial geografis, mobilitas antar generasi, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horional. Mobilitas gerak sosial geografis di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan Surabaya terlihat sangat signifikan sejak dibangunnya jembatan Suramadu. Mobilitas gerak sosial geografis yakni masyarakat yang bergerak dan pindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Dengan adanya jembatan Suramadu ini tidak hanya masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten

Bangkalan saja namun juga masyarakat luar pulau Madura khususnya Surabaya yang dapat lebih leluasa bergerak dan pindah dengan mudah.

Mobilitas antar generasi menyangkut tentang status daerah yakni yang awalnya Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan merupakan daerah plosok sekarang telah menjadi daerah hidup, Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Dalam hal ini mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua arah yakni mobilitas vertikal ke atas (*social climbing*) dan mobilitas sosial vertikal ke bawah (*social sinking*).

Mobilitas sosial vertikal ke atas yang terjadi yakni beberapa orang yang tidak mempunyai pekerjaan berprofesi sebagai pedagang di kawasan kaki jembatan Suramadu dan mendapat pekerjaan sebagai satpam dan buruh industri di Surabaya. Jembatan Suramadu juga membuat mobilitas sosial vertikal kebawah yang sebagian dialami oleh nelayan dan sopir kol yakni mengalami kerugian dan kebangkrutan. Selain itu juga terdapat mobilitas sosial horizontal terlihat dari beberapa orang yang awalnya menjadi pedagang kios di pelabuhan Kamal pindah sekarang menjadi pedagang kios di kawasan kaki jembatan Suramadu. Peneliti melihat bahwa jembatan Suramadu membawa dampak pada mobilitas sosial khususnya mobilitas sosial geografis yang terlihat lebih menguntungkan daerah luar yakni Surabaya. Hal ini karena masyarakat Madura yang lebih banyak berkunjung ke pulau Jawa khususnya Surabaya karena mengingat Madura masih merupakan daerah yang masih membutuhkan banyak kelengkapan fasilitas dan akses penghidupan.

2. Pendidikan

Sebelum adanya jembatan Suramadu ada upaya dalam meningkatkan pendidikan di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

Akan tetapi terdapat dampak negatif dalam bidang pendidikan bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan khususnya yang berkaitan dengan wawasan atau pengetahuan masyarakat. Hal ini karena mobilitas yang rendah di daerah plosok menghambat laju transformasi informasi. Dampak positif terlihat bahwa pendidikan agama di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang menjadi prioritas utama. Pendidikan agama memang sangat baik dalam rangka pembentukan pribadi yang berbasiskan pada nilai-nilai keagamaan. Akan tetapi, memprioritaskan pendidikan agama mengakibatkan pendidikan formal terabaikan sehingga mereka hanya mengetahui bagaimana membangun diri kerohanian diri namun tidak mengetahui bagaimana membangun daerahnya dengan baik.

Dengan demikian jika melihat model pertumbuhan Rostow yang dikutip oleh Budiman (1995:26) dalam konsep pembangunan, masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang termasuk dalam kategori masyarakat tradisional yang mempunyai pengetahuan minim dan belum mampu berpikir secara realistis tentang prospek masa depan maupun dalam merencanakan pembangunan. Selain itu, jika melihat pada dampak sosial pembangunan infrastruktur secara langsung juga dapat mempengaruhi perubahan sosial seperti yang diungkapkan oleh Soekanto (1987:20) kurangnya pengetahuan juga menjadi faktor penghambat dalam perubahan sosial yang lebih baik.

Dampak pembangunan jembatan Suramadu dari segi pendidikan membawa dampak yang positif bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Walaupun belum terlihat secara signifikan, akan tetapi sejak dibangunnya jembatan Suramadu muncul dua sekolah negeri baru yakni SMK dan SMP. Terlihat bahwa ada usaha untuk membangun SDM yang berkualitas sehingga masyarakat menjadi pelaksana dalam pembangunan di daerahnya sendiri sebagai persiapan ketika kawasan Suramadu di kembangkan lebih baik.

Dampak positif lain adalah masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang yang mendapatkan *training*, workshop dan sosialisasi khususnya kepada nelayan dalam rangka membangun SDM berkualitas yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Beberapa nelayan diberi pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara membuat budidaya ekowisata mangrove di pesisir pantai. Hal ini tentu menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi para nelayan. Dengan demikian jika melihat model pertumbuhan Rostow yang dikutip oleh Budiman (1995:26) dalam konsep pembangunan, dapat dikatakan bahwa intervensi pemerintah dalam pembangunan jembatan Suramadu membuat masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang ini menjadi masyarakat yang naik level menjadi masyarakat pra kondisi lepas landas. Hal ini karena intervensi pemerintah dalam pembangunan mengakibatkan sedikit kemajuan pada wawasan dan pengetahuan masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.

Selain itu, jika melihat pada dampak sosial pembangunan infrastruktur secara langsung juga dapat mempengaruhi perubahan sosial seperti yang diungkapkan

Soekanto (1987:20) bahwa pendidikan yang maju dan berorientasi pada masa depan juga menjadi faktor pendorong dalam perubahan sosial yang ada di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

3. Budaya

Sebelum adanya jembatan Suramadu terdapat dampak positif di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Dampak pembangunan jembatan Suramadu dari segi budaya membawa dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Dampak positif berkaitan dengan mulai berubahnya status di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dari daerah plosok menjadi daerah yang lebih hidup dan sekaligus tercipta kontak dengan kebudayaan lain. Hal ini dikarenakan jembatan Suramadu merupakan jembatan antar pulau yang menghubungkan antara pulau Jawa dan pulau Madura yang memiliki perbedaan kebudayaan yang sangat kontras. Selain itu, jembatan Suramadu menjadi penghubung secara langsung antara daerah plosok dengan daerah perkotaan khususnya wilayah Surabaya. Dalam hal ini terjadi sebuah interaksi sosial yang mengakibatkan kerjasama dan komparasi antar budaya Madura dengan Pulau Jawa wilayah Surabaya di pesisir pantai. Nelayan di Madura yakni di Kecamatan Labang dengan nelayan yang ada di Surabaya bekerjasama menggelar kirab dan lomba hias perahu untuk memeriahkan hari Raya Ketupat sekaligus menjalin silaturahmi antar nelayan sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik antar suku. Perayaan hari Raya Ketupat yang

diadakan tujuh hari setelah hari Raya Idul Fitri di Madura sudah menjadi hal kebiasaan dan dirayakan lebih besar dari pada Raya Idul Fitri itu sendiri. Perayaan untuk hari Raya Ketupat dalam bahasa Madura disebut dengan istilah “Tellashen Topa’”.

Dampak negatif berkaitan tatanan nilai dan budaya dalam masyarakat menjadi semakin luntur. Pada umumnya, masyarakat Madura khususnya Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan mempunyai ciri khas berkepribadian sederhana khususnya dalam hal berbusana dan kurang memperhatikan *trend*. Masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan mulai mengimitasi budaya masyarakat kota Surabaya mulai dari gaya hidup, tingkah laku dan pergaulan serta gaya berbusana yang mengikuti zaman. Imitasi mayoritas dilakukan oleh remaja yang kepribadian dan tingkah lakunya masih labil dan mudah terpengaruh karena *trend*. Remaja masa kini lebih sering mengkonsumsi barang-barang yang berasal dari kota Surabaya misalnya ITC dari pada biasanya membeli di pasar tradisional atau di toko terdekat. Harga yang lebih terjangkau, variasi gaya busana modern sekaligus tempat tujuan nongkrong menjadi pilihan remaja yang sangat diminati.

Dampak sosial pembangunan infrastruktur secara langsung juga dapat mempengaruhi perubahan sosial seperti yang diungkapkan Soekanto (1987:20) dalam hal ini yakni berhubungan dengan adanya kontak kebudayaan lain, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju serta sistem yang terbuka dalam lapisan-lapisan juga menjadi faktor pendorong dalam perubahan sosial yang ada di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

b. Dampak dalam Bidang Ekonomi

1. Kelancaran Arus Transportasi

Kodoatie menjelaskan tentang dampak pembangunan transportasi jalan dengan perubahan ekonomi adalah sebagai berikut:

Secara umum, tidak ada satu teoripun yang menyatakan tentang hubungan antara pembangunan transportasi jalan dengan perubahan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, keberadaan jalan dan fasilitas transportasi lainnya pada tingkat tertentu akan secara esensial merangsang dan memberi peluang pertumbuhan ekonomi (Kodoatie, 2005:268).

Inti dari pernyataan Kodoatie yang menjelaskan tentang dampak pembangunan transportasi jalan yakni setidaknya hal tersebut akan menstimulasi dan memberikan jalan peluang dalam kegiatan perekonomian. Pernyataan Kodoatie tersebut sesuai dengan penyajian data peneliti yakni dampak pembangunan jembatan Suramadu dari segi kelancaran arus transportasi membawa dampak yang positif bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Adanya jembatan Suramadu arus transportasi semakin lancar dan bebas hambatan. Masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang tidak perlu lagi menggunakan perahu atau putar balik ke pelabuhan Kamal untuk menyebrang ke pulau Jawa. Dengan demikian kelancaran arus transportasi juga berpengaruh pada kelancaran distribusi barang/jasa dalam kegiatan perekonomian.

Lebih lanjut lagi, menurut Thengsen yang dikutip oleh Kodoatie juga mengungkapkan bahwa:

Investasi pada jaringan jalan utama di negara berkembang hanya akan mengarah pada mereduksi biaya operasi kendaraan dan waktu tempu perjalanan saja, tetapi jarang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi secara signifikan. Kecuali untuk daerah-daerah terisolir dihubungkan dengan

jalan utama. Investasi pada jalan penghubung pedesaan yang membuka daerah terisolir atau mampu mereduksi biaya transportasi secara dramatis sering memiliki peluang lebih besar membangkitkan pembangunan ekonomi (Kodoatie, 2005:269).

Pernyataan Kodoatie tersebut sesuai dengan penyajian data peneliti yakni terlihat bahwa jembatan Suramadu telah menjadi penghubung Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan jalan utama atau jalan raya di Kota Surabaya. Dengan demikian, akses transportasi telah memudahkan masyarakat untuk bisa bergerak dengan mudah dari tempat satu menuju ke tempat lainnya sehingga mengurangi kemacetan di jalur akses pelabuhan Kamal. Selain itu penggunaan waktu dan biaya juga lebih efektif dan efisien juga dapat berpengaruh pada kegiatan perekonomian dalam distribusi barang/jasa.

Jembatan Suramadu juga membuat masyarakat berusaha untuk memiliki kendaraan pribadi sendiri khususnya kendaraan bermotor roda dua secara kredit.

Hal ini karena jembatan Suramadu membuat masyarakat memikirkan akan terpenuhinya kebutuhan hidup dan penghematan waktu serta biaya perjalanan.

Pemanfaatan peluang ekonomi terlihat dari adanya PKL di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura dan sebagian masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang mencari pekerjaan di Surabaya. Pembangunan jembatan Suramadu untuk meningkatkan perekonomian Madura belum terlihat secara signifikan karena lapangan kerja yang masih terbatas sehingga masyarakat lebih memilih untuk mencari peluang kerja ke Surabaya.

2. Kegiatan ekonomi masyarakat

Kodoatie menjelaskan tentang dampak pembangunan transportasi jalan dengan perubahan ekonomi adalah sebagai berikut:

Secara umum, tidak ada satu teoripun yang menyatakan tentang hubungan antara pembangunan transportasi jalan dengan perubahan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, keberadaan jalan dan fasilitas transportasi lainnya pada tingkat tertentu akan secara esensial merangsang dan memberi peluang pertumbuhan ekonomi (Kodoatie, 2005:268).

Inti dari pernyataan Kodoatie yang menjelaskan tentang dampak pembangunan transportasi jalan yakni setidaknya hal tersebut akan menstimulasi dan memberikan jalan peluang dalam kegiatan perekonomian. Pernyataan Kodoatie tersebut sesuai dengan penyajian data peneliti yakni dampak pembangunan jembatan Suramadu dari segi kegiatan ekonomi masyarakat membawa dampak yang positif maupun negatif bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Dampak positif terjadi karena jembatan Suramadu membuat masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang aktif dan kreatif mempunyai pekerjaan baru. Masyarakat dapat melihat peluang ekonomi sehingga mereka membangun kios-kios di kawasan kaki jembatan Suramadu dengan menjual barang-barang khas Madura seperti *souvenir* yang berupa kerajinan tangan dari kerang, layang-layang, miniatur jembatan Suramadu, batik Madura. Selain itu ada juga yang menjualkan makanan dan minuman, jasa toilet sekaligus mushola serta bengkel untuk perbaikan kendaraan. Selain itu, sebagian nelayan juga dapat melihat ada peluang ekonomi di kawasan pantai. Mereka mempunyai inisiatif menyewakan perahunya kepada para pelancong untuk berwisata melihat dan mengitari lorong jembatan Suramadu dari laut.

Disisi lain, jembatan Suramadu ini membawa dampak negatif bagi para sopir kol dan nelayan. Jembatan Suramadu telah mengalihkan penumpang sopir kol

untuk mengkredit motor sehingga penumpang kol menjadi sepi. Ada juga sopir kol yang menyasati keadaan terpuruk seperti ini dengan beralih profesi sebagai pedagang di kawasan kaki Jembatan Suramadu. Dan bukan hanya dari kelompok sopir kol saja yang beralih profesi sebagai pedagang kawasan kaki jembatan Suramadu. Ada juga masyarakat yang awalnya seorang nelayan juga beralih profesi menjadi seorang pedagang. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat alih profesi menjadi seorang pedagang tidak bertahan lama dan memilih kembali ke profesi semula. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa ketidakberhasilan mereka disebabkan oleh karena profesi sebagai pedagang bukanlah *passion* mereka.

Lebih lanjut lagi, menurut Thengsen yang dikutip oleh Kodoatie juga mengungkapkan bahwa:

Investasi pada jaringan jalan utama di negara berkembang hanya akan mengarah pada mereduksi biaya operasi kendaraan dan waktu tempu perjalanan saja, tetapi jarang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi secara signifikan. Kecuali untuk daerah-daerah terisolir dihubungkan dengan jalan utama. Investasi pada jalan penghubung pedesaan yang membuka daerah terisolir atau mampu mereduksi biaya transportasi secara dramatis sering memiliki peluang lebih besar membangkitkan pembangunan ekonomi (Kodoatie, 2005:269).

Pernyataan Kodoatie tersebut sesuai dengan penyajian data peneliti yakni reduksi biaya transportasi yang berpengaruh pada peluang kegiatan perekonomian. Dan pernyataan Kodoatie terlihat juga dari realitas bahwa pedagang-pedagang tersebut memasok barang dagangannya dari Surabaya. Peluang ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Madura saja akan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat Surabaya. Akan tetapi, dalam hal ini terlihat bahwa masyarakat Surabaya yang lebih diuntungkan dari pada masyarakat Madura itu sendiri karena masyarakat Madura yag hanya sebagai pedagang kecil sedangkan masyarakat

Surabaya sebagai produsen. Dengan demikian, walaupun hanya meliputi realitas bertaraf sederhana seperti ini produsen tentu akan lebih mempunyai lebih banyak keuntungan.

3. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Dampak pembangunan jembatan Suramadu dari segi tingkat pendapatan masyarakat membawa dampak yang positif maupun negatif bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Jembatan Suramadu membuat mereka yang aktif dan kreatif mempunyai pekerjaan yang baru yang juga berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan yang terlihat signifikan yakni beberapa pedagang kios di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura. Menurut salah seorang pedagang menyatakan bahwa hasil dari menjual pakaian dan barang dagangan lain tersebut bisa meraup keuntungan 2-3 juta/bulan. Akan tetapi keuntungan pada hari-hari minggu bisa mencapai omzet penjualan 500 ribu dan untuk hari-hari biasa omzetnya kira-kira 100 ribu. Sedangkan untuk nelayan yang menyewakan sekoci pendapatannya sekitar 150rb/hari biasa tapi jika hari libur pendapatannya bisa mencapai 500 ribu.

Jembatan Suramadu ternyata tidak selamanya meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura ini. Hal ini tentu menjadi dampak negatif karena semakin hari pelanggan semakin sepi karena jembatan Suramadu sudah menjadi tidak menarik pengunjung lagi seperti pada waktu awal dioperasikannya jembatan Suramadu. Pendapatan yang didapat oleh pedagang saat ini mengalami penurunan yakni per-hari bisa cuma mendoat

30ribu-50ribu saja. Dan terkadang mereka juga merasa rugi nanun tetap berjualan karena saya tidak punya pekerjaan lain. Hal ini tidak terjadi pada pedagang namun juga terjadi pada nelayan yang menyewakan skocinya. Dampak negatif dari adanya jembatan Suramadu yakni bagi mereka yang kurang aktif dan kreatif dalam meniyasati keadaan mengakibatkan penurunan terhadap pendapatan mereka sehingga ketidakberdayaan mereka membuat mereka menjadi korban pembangunan. Dengan demikian, sampai saat ini pembangunan jembatan Suramadu belum dapat memaksimalkan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat khususnya bagi para pedagang dan nelayan di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

2. Keterkaitan Dampak Sosial Ekonomi Dengan Kebijakan Pengembangan

Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura

a. Sumber Daya Kelembagaan

Menurut Siagian pembangunan diartikan sebagai upaya sadar suatu negara untuk mewujudkan perubahan dan pertumbuhan menuju masyarakat modern dalam rangka pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju dan sejahtera (Siagian, 2001:160). Pembangunan yang saling mendukung yakni sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia dilakukan bersama oleh sektor swasta dan pemerintah akan menentukan keberhasilan pembangunan tersebut. Dari sudut inilah terdapat keterkaitan erat

antara pemerintah selaku fasilitator, motivator dan mediator dengan sektor swasta sebagai pelaku pembangunan. Ada keterkaitan dalam penjelasan tersebut yakni kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berkualitas dan produktif. Peran serta masyarakat didorong dengan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara sinergi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Dalam setiap kebijakan yang dibuat pasti akan membawa dampak yang akan mempengaruhi aspek-aspek tertentu khususnya aspek sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi khususnya di Pulau Madura dalam pengembangan kawasan kaki Jembatan Suramadu sangat berperan penting untuk menyusun rangkaian kebijakan dan strategi. Pembangunan jembatan Suramadu merupakan bentuk realisasi kebijakan pemerintah yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2003 yang merupakan sebuah penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura.

Kodoatie menjelaskan tentang dampak pembangunan transportasi jalan dengan perubahan ekonomi adalah sebagai berikut:

Secara umum, tidak ada satu teoripun yang menyatakan tentang hubungan antara pembangunan transportasi jalan dengan perubahan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, keberadaan jalan dan fasilitas transportasi lainnya pada tingkat tertentu akan secara esensial merangsang dan memberi peluang pertumbuhan ekonomi (Kodoatie, 2005:268).

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti melihat bahwa jembatan Suramadu sebagai transportasi jalan baru yang menjadi jalan penghubung antar pulau memang membuat kelacaran transportasi mengingat akses penyebrangan di

Madura sebelumnya masih terbatas. Akan tetapi, pemerintah disini melihat ada sebuah peluang yang besar terhadap pembangunan sosial ekonomi di Madura.

Dalam mengembangkan sosial ekonomi tersebut masyarakat juga perlu dibimbing agar dapat melihat secara detail peluang ekonomi sosial yang ada. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan membentuk badan pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sebagai fasilitator, motivator dan mediator yang bekerjasama dengan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk membangun Madura dan mengembangkan kawasan kaki jembatan Suramadu.

b. Kebijakan dan Strategi

Menurut Siagian pembangunan diartikan sebagai upaya sadar suatu negara untuk mewujudkan perubahan dan pertumbuhan menuju masyarakat modern dalam rangka pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju dan sejahtera (Siagian, 2001:160). Dalam pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu di sisi Madura meliputi badan pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang dibentuk pemerintah untuk membangun Madura khususnya kawasan jembatan Suramadu. BPWS dibentuk dalam mencapai keberhasilan tujuan dari kebijakan pembangun jembatan Suramadu yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2003 yakni meningkatkan perekonomian Pulau Madura pada khususnya dan Propinsi Jawa Timur pada umumnya. BPWS mempunyai rencana induk, kebijakan serta strategi yang realisasinya didukung oleh sumber daya personel berstatus tenaga profesional.

Hogwood dan Lewis A. Gunn yang dikutip oleh (Wahab, 2008:18) mengelompokkan beragam penggunaan istilah kebijakan ke dalam sepuluh macam. Dan dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh BPWS dalam mengembangkan kawasan kaki jembatan Suramadu termasuk dalam kategori *Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs* (kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut dibuat untuk mencapai visi misi BPWS sehingga juga dibuat beberapa strategi agar lebih terencana dan sistematis. Kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu tidak hanya mengakomodir rencana kegiatan pengembangan infrastruktur wilayah, melainkan di dalamnya juga terinci penyiapan sumber daya manusia (SDM).

3. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi

Madura

a. Efektifitas Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi

Madura

Efektifitas dalam evaluasi menekankan pada pertanyaan “apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?”

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan menuju suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut terdapat sebuah

kebijakan agar pembangunan dapat efektif yakni berjalan secara terarah dan sistematis. Dengan demikian hasil yang diinginkan dapat tercapai.

Pulau Madura khususnya di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan masih merupakan daerah yang tertinggal di Jawa Timur dan membutuhkan pembangunan untuk mendongkrak dalam keadaan yang lebih maju baik itu peningkatan dari aspek sosial maupun ekonomi. Hubungan sosial dan ekonomi sangat berkaitan satu sama lain misalnya pendidikan yang maju dan modern yang tentu akan mempengaruhi perkembangan ekonomi. Hal ini yang dijadikan landasan BPWS dalam mengatur kebijakan dan strategi dengan melihat keadaan sosial ekonomi yang ada sehingga akan lebih efektif dalam mencapai visi dan misinya.

BPWS yang hadir sebagai badan pelaksana bersifat sementara/*ad hoc* sejauh ini sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari respon BPWS terhadap aksi demo masyarakat Madura yang diwakili oleh dengan mengatasnamakan ormas Madura sempat menuntut untuk membubarkan BPWS. Tindakan BPWS dalam menangani masalah ini yakni dengan melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa BPWS sudah berusaha untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yakni terbukti dengan berjalannya program tahun 2011-2012 meliputi:

- Desain Pembangunan rest area di lahan KKJSM seluas 40 ha dan rencana pembangunan masjid ikon Madura di pintu masuk KKJSM.

- Penjajagan dan promosi investasi dengan pihak asing terus diretas. Diantaranya dengan Gubernur Provinsi Okinawa Jepang, China dan sejumlah Negara manca Asia Negara lainnya.
- Pemetaan Potensi Wilayah.
- Konsultasi Publik.
- Program Pemberdayaan Masyarakat, seperti: Pelatihan UMKM, Pelatihan Pemanfaatan Hutan Mangrove, Pelatihan Kriya Logam, Pelatihan IT untuk pondok pesantren, dll.

b. Efisiensi Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi

Madura

Efisiensi dalam evaluasi menekankan pertanyaan “seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?.

Pembangunan tidak bisa berjalan apabila terdapat kendala sehingga menyebabkan kemacetan dalam efisiensi proses pembangunan. Harapan pemerintah dalam membangun infrastruktur jembatan Suramadu bukan hanya sebagai jembatan penghubung antar daerah saja. Akan tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian di kedua sisi daerah yang terhubung baik di sisi Madura maupun sisi Surabaya. Oleh karena itu pemerintah juga membentuk BPWS sebagai Badan Pelaksana yang bersifat sementara/*ad hoc* dalam rangka membantu harapan pemerintah tersebut. Pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan melibatkan pemerintah provinsi, begitu juga pemerintah provinsi melibatkan pemerintah kabupaten.

Konflik yang sempat muncul yakni demo pembubaran BPWS yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dari pihak Madura karena BPWS dinilai membuat diskriminasi dan penyimpangan terhadap otonomi daerah. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dinamika politik yang mempunyai tujuan

kepentingan sendiri khususnya mengenai dana dalam pembangunan. Dana menjadi sangat sensitif dalam pembangunan, khususnya menyangkut proyek pembangunan yang sangat besar. Mereka menuntut agar pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura diserahkan ke BAPEDDA.

Pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu tidak bisa dilakukan dengan cepat dalam waktu 1-2 tahun mengingat perbedaan budaya yang harus dipahami untuk menyelaraskannya. Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat bahwa memang benar butuh waktu yang sangat panjang dalam proses pembangunannya. Dan BPWS menargetkan bahwa dalam jangka 20-35 tahun mereka akan berhasil melaksanakannya.

c. Kecukupan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura

Kecukupan dalam evaluasi menekankan pertanyaan “Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?”.

Pencapaian hasil yang diinginkan sejauh ini masih dalam tahap pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan masyarakat Madura di empat kabupaten yakni Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan.

Penyiapan SDM termasuk di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan agar menjadi *leader* di daerahnya sendiri sehingga tidak termajinalkan oleh daerah luar. Selain itu, BPWS juga telah menyelesaikan desain infrastruktur, penjajagan investasi dan konsultasi publik.

Kendala yang paling sering membuat pembangunan proyek infrastruktur terhalang adalah pembebasan lahan yang memerlukan proses panjang dan rumit.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan. Saat ini pembangunan terus meningkat sedangkan persediaan tanah tidak berubah.

Keadaan ini berpotensi menimbulkan konflik karena kepentingan umum dan kepentingan perorangan saling berbenturan.

Tanah merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang paling penting karena walaupun dana memadai sedangkan tidak ada tempat untuk dibangunnya infrastruktur tersebut maka tidak akan ada realisasi pembangunan. Dalam setiap kegiatan pembangunan pasti memerlukan tanah sehingga tanah memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Dengan demikian, pengadaan tanah juga menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan.

d. Pemerataan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi Madura

Pemerataan dalam evaluasi menekankan pertanyaan “apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?”.

Mewujudkan pembangunan yang merata hingga di daerah terpencil bukanlah hal yang mudah, perlu rancangan dan pengumpulan informasi langsung dari masyarakat di sekitarnya tentang apa yang dibutuhkan. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sehingga kehidupan mereka dapat menjadi

sejahtera. Dan kesejahteraan masyarakat di tiap daerah sampai ke pelosok merupakan salah satu bukti pemerataan dikatakan berhasil.

Kebijakan pengembangan wilayah Jembatan Suramadu bukan hanya mengembangkan kawasan kaki jembatan saja akan tetapi juga pengembangan Madura secara keseluruhan. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa kebijakan pengembangan wilayah Jembatan Suramadu sisi Madura telah berusaha melakukan pemerataan kebijakan di empat kabupaten Madura yakni Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan. Pemerataan pengembangan wilayah Suramadu juga sampai ke daerah pelosok yakni di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

Pemerataan pembangunan dikatakan berhasil apabila laju urbanisasi menurun. Akan tetapi, jika dilihat dari tujuan dari kebijakan pembangunan Jembatan Suramadu itu sendiri yakni menciptakan pemerataan dan meningkatkan perekonomian di Madura pada khususnya. peneliti disini melihat bahwa tujuan kebijakan tersebut belum merata. Hal ini terbukti dengan masyarakat Madura khususnya di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan masih banyak melakukan urbanisasi ke kota Surabaya untuk mencari pekerjaan yang rata-rata menjadi buruh Industri.

e. Responsifitas Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu

Sisi Madura

Responsifitas dalam evaluasi menekankan pada pertanyaan “apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?”.

Pencurian infrastruktur di kawasan kaki jembatan Suramadu merupakan bentuk responsifitas negatif dari masyarakat. Budaya mencuri di Indonesia sudah melekat baik itu dalam diri para pejabat pemerintah tertinggi sampai pada tingkatan yang terendah serta masyarakatnya itu sendiri. Untuk kalangan pejabat korup yang dinilai pendapatannya sudah sangat dapat memenuhi kebutuhan hidup namun mereka tetap melakukan penyelewengan karena faktor ingin memenuhi kepuasan hidup.

Pernyataan diatas berarti bahwa bentuk pemenuhan kebutuhan hidup naik beberapa tingkat diatas pemenuhan dasar kebutuhan hidup orang yang kesejahteraannya benar-benar dibawah rata-rata. Hal ini tentu memperkuat istilah yang sudah sering didengar yakni “yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin”. Jika melihat dalam pasal 34 UUD’45 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (2) UUD’45 disebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak fakir miskin dan anak terlantar yang tidak mendapatkan fasilitas dan penghidupan yang layak sehingga muncul adanya tindakan kriminalitas. Hal ini merupakan akibat dari pemerataan pembangunan yang masih kurang maksimal.

Bagi masyarakat kalangan bawah yang kesejahteraan hidupnya belum terpenuhi mereka akan melakukan segala cara dalam pemenuhan kebutuhan hidup salah satunya adalah dengan nekat mencuri. Ini berarti ibarat kemiskinan telah menjadi ibu dari kriminalitas dan menjadi bapak dari kurangnya akal sehat.

Pencurian baut dan kabel *main power* jembatan Suramadu membuat persepsi orang tentang “Madura juragan besi tua” sekaligus telah membuat masyarakat luar pulau Madura beranggapan bahwa orang Madura adalah lakon dalam tiap kasus tersebut. Jika rumor ini dibiarkan maka akan menimbulkan konflik sosial sampai pada pengucilan daerah. Dalam hal ini terlihat bahwa pembangunan telah menjadi sebuah hal yang sangat riskan berkaitan dengan kesenjangan sosial antara ketidakberdayaan masyarakat miskin yang menjadi korban pembangunan dan oknum yang tidak mempunyai tanggungjawab.

f. Ketepatan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu Sisi

Madura

Ketepatan dalam evaluasi menekankan pada pertanyaan “apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna?”

Peneliti melihat bahwa kebijakan pengembangan wilayah Jembatan Suramadu sisi Madura ini sudah tepat. Hal ini karena kebijakannya yang mengacu pada kondisi sosial ekonomi daerah terdampak sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian kebijakan ini sangat berguna bagi masyarakat Madura termasuk Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.